

**TERSENDAT-SENDATNYA PEMULIHAN DAMAI ANTARA ISRAEL DAN
PALESTINA DI BAWAH PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI BENJAMIN
NETANYAHU**

Skripsi



Oleh :

Ria Almayrissa Suzan Silaban

151060193

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2011**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN hal

A. Alasan Pemilihan Judul.....	5
B. Latar Belakang Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	20
D. Kerangka Berpikir.....	20
E. Argumen Pokok.....	29
F. Metode Penelitian.....	29
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	30
H. Batasan Penelitian.....	31
I. Rencana Sistematika Penulisan.....	31

BAB II GAMBARAN UMUM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PERIODE KEDUA BENJAMIN NETANYAHU

A. Gambaran Umum Konflik Israel dan Palestina.....	35
B. Karakteristik Kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu 2009-2010.....	42

BAB III TIDAK BERJALANNYA PEMULIHAN DAMAI KARENA PERBEDAAN PERSEPSI DAN KETIADAAN KOMITMEN

A. Persepsi Israel Tentang Perundingan dan Ketidadaan Komitmen.....	51
1. Persepsi Israel tentang Perundingan.....	52
2. Ketidadaan Komitmen dari Netanyahu.....	62
B. Persepsi dan Komitmen Palestina tentang Perundingan.....	70
1. Persepsi Palestina tentang Perundingan.....	71
2. Keinginan Palestina terhadap Upaya Damai.....	77

BAB IV STAGNASI KONDISI KONFLIK AKIBAT TERHAMBATNYA PEMULIHAN DAMAI

A. Pengaruh Kebijakan Netanyahu terhadap Stagnasi Perundingan Damai.....	84
B. Situasi Konflik antara Israel dan Palestina Akibat Tidak Adanya Persamaan Persepsi dan Komitmen.....	100
C. Tersendat-sendatnya Perundingan Damai.....	104
D. Dampak Situasi Konflik terhadap Palestina.....	107

BAB V KESIMPULAN	110
-------------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 DATA PEMUKIMAN DENGAN PELANGGARAN DALAM SKALA BESAR.....	91
TABEL 2 DATA RENCANA KONSTRUKSI DI TEPI BARAT.....	95
TABEL 3 DATA KONSTRUKSI PASCA MORATORIUM DI TEPI BARAT.....	99

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Israel dan Palestina adalah dua negara di kawasan Timur Tengah yang populer dalam kajian dan perhatian studi ilmu hubungan internasional karena konflik antara keduanya yang tak kunjung mencapai jalan keluar dalam setiap kesepakatan damai. Pertikaian kedua negara tersebut menjadi sorotan fora internasional sehingga banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi mempengaruhi situasi konflik, baik yang terkait dengan resolusi maupun yang turut andil mempersulit substansi permasalahan tersebut.

Pasang surut situasi konflik kedua negara tersebut yang dipengaruhi oleh dominasi kebijakan elit *incumbent* Israel menyebabkan jauhnya harapan akan terwujudnya perdamaian antara kedua belah pihak. Pergantian pemerintahan dari kubu moderat hingga kubu fundamentalis maupun sebaliknya di negara Israel, tidak membuat perubahan yang berarti terhadap situasi konflik, akan tetapi yang terjadi adalah kesinambungan atmosfer pemerintahan dan kebijakan dari kekuasaan sebelumnya.

Benjamin Netanyahu yang terpilih kembali sebagai perdana menteri periode kedua di Israel merupakan topik yang menarik dan relevan untuk dikaji karena visi dan misi serta kebijakan-kebijakannya yang kontroversial menawarkan atmosfer politik yang dinamis dalam masyarakat Israel dan mengenai perkembangan hubungan

Israel dengan Palestina. Di samping peta politik masyarakat Israel yang cenderung beralih ke kubu haluan kanan pasca jajak pendapat yang diungguli oleh partai Likud dengan slogan dan kampanye bertema keamanan dan kesatuan nasional; akibat pasca agresi Israel ke Gaza dan situasi politik yang tidak kondusif pada pemerintahan Ehud Olmert; serta kegagalan Tzipi Livni menjalankan mandat dari Shimon Peres untuk membentuk koalisi pemerintahan, sehingga pada akhirnya menghantarkan Israel setahun lebih cepat ke pemilihan umum berikutnya tanggal 10 Februari 2009, dari empat tahun masa pemerintahan Ehud Olmert yang seharusnya.

Nasib hubungan Israel dan Palestina tidak terlepas dari karakter dan kebijakan pemerintahan di Israel, terlebih dengan berhasilnya Netanyahu menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya. Sejak awal menjabat sebagai perdana menteri dengan tegas Netanyahu menyampaikan arah haluan kebijakannya ke depan, terutama mengenai hubungan (perdamaian) dengan Palestina. Dasar-dasar kebijakan Netanyahu inilah yang menjadi batu sandungan sulitnya pemulihan damai yang akan dicapai dengan Palestina. Koalisi pemerintahan yang didominasi partai-partai ultranasionalis kanan dan ortodoks, kecuali Partai Buruh semakin melancarkan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan secara sepihak bagi Israel.

Sekalipun Netanyahu menyetujui gagasan perundingan langsung yang diusung oleh Amerika Serikat, di lain sisi ia menutup peluang untuk direalisasikannya inti dari perundingan langsung tersebut, yaitu mengenai *two state solution*, di mana Israel dan Palestina berdiri sebagai dua negara dalam satu wilayah yang sama, yaitu

Palestina. Mengenai status Yerusalem pun Netanyahu bersikeras tidak akan pernah membagi wilayah tersebut dengan Palestina.

Kebijakan krusial Netanyahu lainnya yang mengancam pemulihan damai dengan Palestina adalah ekspansi pemukiman Yahudi di teritori legal milik Palestina. Secara signifikan, perlahan tapi pasti Israel menggerus identitas masyarakat Palestina dengan kolonisasi para pemukim Yahudi. Mahmoud Abbas, sebagai presiden Otoritas Palestina yang menginginkan perundingan damai menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan apabila Israel belum memberikan konsesi yang adil bagi Palestina.

Akibat kebijakan pemerintahan Netanyahu yang mendominasi tersebut sehingga perundingan langsung akan semakin jauh dari kata sepakat antara Israel dan Palestina. Tidak munculnya kata sepakat dari salah satu pihak perunding perdamaian dan saling klaim kepentingan yang dibawa oleh Israel maupun Palestina adalah menjadi latar belakang jauhnya harapan akan realisasi damai dari setiap perundingan.

Oleh karena itu berdasarkan alasan dan pemaparan di atas serta melihat kondisi relevan yang terjadi di Israel dan Palestina, terutama mengenai perundingan langsung, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tema “Tersendat-sendatnya Pemulihan Damai antara Israel dan Palestina di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu”.

B. Latar Belakang Masalah

Pada Maret 2009 pemerintahan Israel yang ke-32 kembali dipimpin oleh Benjamin Netanyahu yang menang pada pemilihan umum Israel tanggal 10 Februari 2009 karena kesuksesannya membentuk koalisi yang terdiri dari Partai Yisrael Beiteinu (15 kursi), Partai Buruh (13 kursi), Partai Shas (11 kursi) dan Partai *Jewish Home* (3 kursi). Partai Likud yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu memperoleh 27 kursi. Benjamin Netanyahu berhasil mengalahkan rivalnya dari Partai Kadima, yaitu Tzipi Livni yang lebih moderat mengenai masa depan hubungan Israel dengan Palestina. Tzipi Livni gagal menggalang dukungan, terlebih dari Partai Buruh yang ternyata ambil bagian dalam kabinet Netanyahu. Dengan jumlah 69 kursi, Likud berhasil mendapat kursi di parlemen (*Knesset*) dari perolehan seharusnya yaitu separuh lebih satu (60+1 dari 120 kursi). Ditambah dengan bergabungnya *United Torah Judaism* dalam koalisi Netanyahu, semakin mengukuhkan kekuasaan mantan perdana menteri Israel periode 1996-1999 tersebut di *Knesset*, sehingga apabila salah satu partai keluar dari koalisi maka tidak akan berpotensi untuk menjatuhkan pemerintahan.¹

Kondisi pemerintahan Benjamin Netanyahu yang juga disebut “*the Second Netanyahu Government*” didominasi oleh partai-partai kanan ultranasionalis dan ultra-ortodoks seperti Yisrael Beiteinu, Shas dan Habayit Hayehudi (*Jewish Home*)

¹ Kenig Ofer. “Israel’s New Government”, <http://www.idi.org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/elections09/Pages/IsraelsNewGovernment.aspx>. Akses 13 Desember 2010.

dan *United Torah Judaism*. Netanyahu dan Ketua Yisrael Beitenu Avigdor Lieberman dari garis keras memiliki persepsi yang berbeda dengan Partai Buruh yang lebih moderat menyangkut kebijakan terhadap konflik terutama mengenai sengketa geopolitik dengan Palestina. Sedangkan Yisrael Beitenu, Partai Shas dan *Jewish Home* memiliki persamaan mendasar mengenai konsep negara Israel, yaitu untuk memenuhi tiga ideologi Zionism, yaitu *aliya*, mempertahankan wilayah dan mendukung kegiatan pemukiman. Selain itu, partai-partai ultranasionalis dan ultraortodoks tersebut tidak menginginkan satu warga Arab pun tinggal di Israel, bahkan menjabat di Parlemen.²

Karakter pemerintahan negara Israel didasari oleh kebangkitan para Yahudi di Palestina pada awal abad ke-19, dengan adanya imigrasi pertama kali yang dimotivasi oleh ideologi nasional atau *Alia Rishona* serta dibentuknya *World Zionist Organization* (1897) yang bertujuan untuk menciptakan suatu entitas politik Yahudi dan terutama adalah sebuah negara.³ Selain itu karena kuatnya pengaruh latar belakang dan dominasi kubu haluan kanan menjadikan sistem pemerintahan negara Israel yang menganut demokrasi menjadi bias. Sekalipun ada beberapa penganut radikal yang mengaku demokrat tetapi tidak dapat menutupi pendirian mereka bahwa pada kenyataannya kedudukan demokrasi lebih inferior daripada kedudukan norma-

² Mossawa Center, "One Year for Israel's New Government and the Arab Minority in Israel", <http://www.mossawacenter.org/files/files/File/Reports/2010/Netanyahu%20Final.pdf>. Akses pada 11 Maret 2011.

³ Jehuda Reinharz & Anita Shapira, *Essential Papers on Zionism*. New York University Press, New York & London, 1996, hlm. 567.

norma kolektif yang lebih tinggi seperti: integritas teritori, supremasi dari hukum-hukum agama dan superioritas masyarakat Yahudi yang bersifat *a priori* terhadap masyarakat lainnya.⁴ Benjamin Netanyahu merupakan representasi ideologi partai Likud yang *hawkish* (garis keras atau bersifat mempertahankan kebijakan garis keras) adalah sosok yang tepat bagi para ekstremis di *Knesset* dan masyarakat Israel yang pro dengan negara Yahudi untuk menyalurkan dan melancarkan kepentingan mereka.

Bagi masyarakat dan pemilih Israel, faktor yang cukup menentukan adalah mengenai keamanan dan prestise. Artinya partai yang dapat menjamin keamanan dan prestise masyarakat Yahudilah yang mempunyai peluang besar untuk menang. Untuk memilih mana yang bisa menjamin keamanan dan prestise tentunya akan dilihat dari sikap dan pandangan partai terhadap sesuatu yang dianggap ancaman keamanan.⁵ Sebagai contoh adalah kegagalan pemerintahan Ehud Olmert dalam menciptakan keamanan pasca serangan militer Israel ke Jalur Gaza dalam Operasi *Cast Lead* dan citranya yang sempat memburuk akibat tuduhan korupsi, pada akhirnya membuat Olmert meletakkan jabatannya. Hal ini menjadi faktor dipercepatnya pemilihan umum 2009.⁶

Operation Cast Lead yang terjadi pada 27 Desember 2008 adalah peristiwa serangan terbesar yang dilakukan Israel untuk melawan pergolakan Hamas di Jalur

⁴ Ehud Sprinzak. *The Ascendancy of Israel's Radical Right*. Oxford University Press, Inc, :New York, 1991, hlm.295.

⁵ M. Hamdan Basyar, "Kiprah Parlemen Israel". *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 49-59, 1993.

⁶ Mark Tran, "Netanyahu Calls for New Israeli Elections", <http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/31/israelandthepalestinians1>. Akses pada 23 Oktober 2010.

Gaza. Naiknya rezim Hamas di Jalur Gaza setelah *coup d'état* terhadap Fatah pada pemilu 2007, merupakan latar belakang Olmert mengerahkan operasi militer *Cast Lead* sebagai upaya defensif, karena disinyalir bahwa Iran membantu gerakan Hamas.⁷ Selama operasi tersebut Israel terus menerus menggempur Jalur Gaza dengan melakukan pengeboman, pembunuhan ekstrajudisial, pengambil-alihan tanah, penghancuran rumah, penutupan perbatasan dan penahanan. Faktanya, Ehud Olmert ingin meraih simpati dari masyarakat Israel karena keputusannya meluncurkan operasi demi keamanan Israel, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat Israel merasa bahwa negaranya tidak aman dengan adanya perang dan adu senjata.

Mengenai pembicaraan damai dengan Palestina, pemerintahan Benjamin Netanyahu mengisyaratkan tidak berniat untuk mendukung gagasan dua negara yang dimediasi oleh *Western-backed* tersebut. *Western-backed* adalah dukungan dari pihak Barat, seperti Amerika Serikat dan *The Quartet* yang terdiri dari PBB, Rusia, Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Gagasan tersebut menyangkut berdirinya negara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*), yaitu di mana tanah yang diokupasi oleh Israel sejak 1967, Tepi Barat dan Gaza dibagi dua untuk menjadi negara Israel dan negara Palestina.⁸ Sementara itu Netanyahu mengusung kepentingan politiknya sendiri seperti tidak diperbolehkannya

⁷ Avigdor Lieberman. "Europe's Irresponsible Gaza Policy", http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703667904576071302605456360.html?mod=googlenews_wsj#. Akses pada 4 Februari 2011.

⁸ Matt Beynon Rees. "Analysis: All Talk, no two-state solution", <http://www.globalpost.com/dispatch/israel-palestine/100708/two-state-solution-netanyahu-abbas>. Akses pada 16 Desember 2010.

penarikan pasukan Israel dari *Golan Heights* dan *Jordan Valley*, tidak ada partisi untuk Yerusalem, dan tidak direalisasikannya solusi dua negara.⁹

Sekalipun menganut haluan ultranasionalis, dalam mengambil keputusan terutama mengenai hubungan dengan Palestina dan menyangkut tema upaya perundingan perdamaian, Netanyahu juga mempertimbangkan suara dari partner koalisinya yang dominan religious-nasionalis. Seperti pada berakhirnya pembekuan pembangunan 26 September 2010 di Tepi Barat, kaum kolonis yang pro-pemukiman dan juga pendukung Likud tidak menanggapi perintah perdana menteri untuk menunggu instruksi selanjutnya. Tetapi pada akhirnya Netanyahu juga tetap bergeming mengenai kebijakan selanjutnya setelah pembekuan berakhir sehingga para pemukim langsung merayakannya dengan meletakkan batu pertama di konstruksi pembangunan di daerah Tepi Barat yang telah direncanakan untuk dibangun sebanyak 13.000 bangunan baru.¹⁰

Bagi Netanyahu mengalah tidaklah mudah. Jika ia memberikan konsesi terlalu banyak bagi Palestina, pemerintahan haluan kanannya berpotensi pecah. Oleh karena itu setiap kebijakan Netanyahu yang didominasi oleh faktor-faktor kepentingan nasionalnya, juga dipengaruhi oleh para pendukungnya yang ekstremis nasionalis. Selain itu ideologi partai kanan yang berhaluan keras menjadi dasar langgengnya

⁹ Hillel Schenker. "Peace Prospects after the Israeli Elections", <http://www.pij.org/details.php?id=1214>. Akses pada 16 Desember 2010.

¹⁰ "Israel Setujui 13.000 Rumah Baru". <http://internasional.kompas.com/read/2010/09/13/15460790/Israel.Setujui.13.000.Rumah.Baru>. Akses pada 12 Oktober 2010.

kebijakan-kebijakan bersifat zionis di Israel. Gerakan nasional Zionisme yang diprakarsai oleh Theodore Herzl pada tahun 1897 tidak lagi seotentik gagasan awalnya, yaitu membentuk *national home* bagi rakyat Yahudi. Tujuan Zionisme semakin berkembang di awal abad ke-20 dan dipengaruhi oleh para imigran Yahudi dari Eropa yang membawa paham sekular dan komitmen untuk menciptakan negara Yahudi yang modern dan independen.¹¹

Ada dua bentuk paham Zionisme berbeda yang waktu itu dominan. Dari tahun 1920 sampai tahun 1970, *Labor Zionism* menguasai peta politik rakyat Yahudi dengan salah satu gerakannya yaitu *kibbutz*. *Kibbutz* adalah suatu kumpulan masyarakat yang berbasis pada ekonomi pertanian. Oposisinya yaitu gerakan Revisionis yang digagas oleh Vladimir Jabotinsky. Gerakan Revisionis ini berbeda dari Buruh (*Labor*) karena bertujuan untuk menciptakan negara Yahudi daripada *national home* yang secara definitif masih rancu. Untuk memantapkan tujuannya, Zionisme Revisionis di bawah pimpinan Jabotinsky berfokus untuk mendapatkan bantuan Inggris demi pembangunan pemukiman. Kaum Revisionis inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Likud, partai sayap kanan terbesar di Israel sejak 1970-an.¹²

Benjamin Netanyahu sendiri bersedia menegosiasikan perdamaian apabila Palestina menyanggupi dua prinsip yang menjadi dasar kebijakannya, yaitu

¹¹ Joel Beinin & Lisa Hajjar, "Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict: A Primer", http://www.merip.org/palestine-israel_primer/Palestine-Israel_Primer_MERIP.pdf. Akses pada 8 Maret 2011.

¹² *Ibid.*

recognition (pengakuan) dan demiliterisasi. Prinsip *recognition* (pengakuan) adalah bahwa Israel sebagai negara Yahudi mengacu pada sejarah sebagai tanah yang telah dijanjikan (*the promised land*) lebih dari 3.500 tahun yang lalu, di mana Yudea dan Samaria merupakan tempat tinggal nenek moyang orang Israel. Tanah tersebut juga akan menjadi tempat bersatunya warga Yahudi yang selama ini mengalami diaspora dan penderitaan akibat *Holocaust*, di bawah naungan negara Israel. Sedangkan prinsip demiliterisasi negara Palestina diperlukan agar nantinya sebagai dua negara yang hidup berdampingan, Israel merasa lebih aman dari ancaman teror gerakan militan Palestina. Karena menyangkut konteks ‘keamanan’, yang temanya sangat identik dengan pemerintahan Netanyahu, maka demiliterisasi negara Palestina lebih diprioritaskan, antara lain: 1) mencakup tidak adanya angkatan militer di negara Palestina; 2) tidak adanya kontrol atas wilayah laut, darat dan udara Palestina karena Israellah yang akan mengambil alih; 3) serta dengan tindakan yang efektif untuk mencegah penyelundupan senjata ke wilayah-wilayah demi menghindari peristiwa yang terjadi di Gaza.¹³

Negosiator senior Palestina Saeb Erekat menanggapi persyaratan Netanyahu tersebut secara pesimis karena kondisi yang ditawarkan kepada rakyat Palestina menyangkut poin krusial suatu negara. Terlebih terhadap masa depan perundingan damai dengan kenyataan yang tidak *win-win solution*. Erekat menegaskan dengan

¹³“Prime Minister’s Foreign Policy Speech at the Begin-Sadat Center at Bar-Ilan University, June 14, 2009”, The Israel Project, <http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=hsJPK0PIJpH&b=689705&ct=7128353>. Akses pada 16 Desember 2010.

solusi sepihak dari Israel tersebut “*closed the door to permanent-status negotiation*”.¹⁴

Ekspansi pemukiman merupakan salah satu dari program kebijakan pemerintahan Netanyahu. Netanyahu bahkan menyatakan bahwa meluasnya pembangunan juga didasari oleh “*natural growth*”, bukan faktor kesengajaan. Namun pada kenyataannya persepsi mengenai pertumbuhan alami tersebut ialah bahwa 37% populasi dari penduduk di pemukiman bertambah dari kedatangan penghuni baru sehingga otomatis meningkatkan jumlah pembangunan rumah bagi para pemukim tersebut.¹⁵

Perundingan langsung dengan Palestina dan solusi dua negara telah dibahas dan direncanakan sejak Netanyahu resmi menjadi perdana menteri. Pendukung solusi ini adalah Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan rival Likud partai Kadima yang dipimpin oleh Tzipi Livni. Isu tersebut sempat tertunda karena pemerintahan Netanyahu lebih fokus pada aktivitas pemukiman. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menanggapi kegiatan Israel tersebut akan menyulitkan kedua belah pihak menuju meja perundingan bahkan mencapai kata sepakat.

Sedangkan kebijakan Netanyahu mengenai status Yerusalem, yaitu menjadi bagian (ibukota) yang tidak terpisahkan dari Israel dan rakyat Yahudi; dan menyangkut ekspansi pemukiman terutama di Tepi Barat serta Yerusalem Timur,

¹⁴ “Tel Aviv: Netanyahu’s Change of Heart”, *TIME* vol. 173, no. 25/26, 2009.

¹⁵ Tim MCGirk, “The Old Bibi or A New One”, *Time* Vol. 173 No.19, 2009, hlm.28.

merupakan kegiatan legal untuk mengakomodasi pertumbuhan keluarga para pemukim. Di sisi lain Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibukota masa depan. Tetapi dengan masalah perluasan pemukiman yang dijanjikan oleh Netanyahu dan juga sebagai pihak yang bertentangan dengan solusi dua negara, maka semakin mengusik harapan serta rencana rakyat Palestina tersebut.¹⁶ Karena semakin jauh dari kepentingan intinya akibat dampak/pengaruh dari kebijakan elit Israel, sehingga Mahmoud Abbas memutuskan vakum dari proses perundingan damai sampai Netanyahu menetapkan kebijakan yang dapat melancarkan upaya damai.

Selain mendapat tekanan dari pemerintah Amerika Serikat sebagai mediator perundingan langsung; terlebih perundingan langsung yang telah disepakati pada tanggal 2 September 2010, mau tidak mau Israel harus mengalah untuk kelangsungan perundingan damai. Hingga akhirnya Netanyahu menyepakati desakan Amerika Serikat, yang kemudian mencapai kata sepakat pada Agustus 2009. Kemudian diputuskanlah kebijakan pembekuan pemukiman oleh pemerintahan Netanyahu pada November 2009, selama 10 bulan. Moratorium pemukiman tersebut hanya berlangsung di Tepi Barat yang sedang memasuki tahap konstruksi baru, sementara Yerusalem yang diklaim sebagai induk negara rakyat Yahudi tidak turut dibekukan (*partial settlement freeze*).¹⁷ Jangka waktu 10 bulan tersebut dimulai pada 25

¹⁶ Josh Mitnick. "Netanyahu's Two State Solution: You Recognize Us, We'll Recognize You", <http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2009/0615/p06s16-wome.html>. Akses pada 16 Desember 2010.

¹⁷ M. Hamdan Basyar. "Ganjalan Perdamaian Palestina dan Israel", <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/middle-east-affairs/329-ganjalan-perdamaian-palestina-dan-israel>. Akses pada 20 Oktober 2010.

November 2009 sampai dengan 26 September 2010, yang fatalnya bersamaan dengan proses perundingan langsung yang dimulai pada 2 September 2010. Bersamaan dengan diumumkannya moratorium, Netanyahu juga menegaskan setelah kebijakan tersebut berakhir ia akan meneruskan kembali pembangunan pemukiman Yahudi.¹⁸

Berakhirnya pembekuan pembangunan pada 26 September 2010 berdampak pada vakumnya kembali perundingan langsung antara Israel dan Palestina yang sedang berjalan pada waktu itu. Kepentingan pihak pro-pemukiman (para ekstremis Yahudi) serta implementasi kebijakan Netanyahu yang mewakili ideologi zionis lebih diprioritaskan ketimbang tema perdamaian yang secara tidak langsung sering dinyatakan Netanyahu dalam setiap pidatonya. Perdamaian bagi Israel dan Palestina merupakan hal yang utopis karena setiap kali perundingan direalisasikan selalu terhalang dengan konsesi-konsesi berat dan politis dari kedua pihak, terutama dari Israel yang secara elemen kekuatannya lebih dominan. Elemen tersebut mencakup dua hal, yaitu: 1) Elemen kekuatan yang nyata, meliputi populasi/penduduk, teritorial, sumber alam dan kapasitas industri, kapasitas pertanian dan kekuatan militer/mobilitas; dan 2) Elemen kekuatan yang tidak nyata, meliputi kepemimpinan dan kepribadian, efisiensi organisasi-birokrasi, tipe pemerintah, *social cohesiveness*

¹⁸ "Statement by PM Netanyahu on the Cabinet Decision to Suspend New Construction in Judea and Samaria",
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2009/Statement%20by%20PM+Netanyahu+suspend+new+construction+Judea+Samaria+25-Nov-2009>. Akses pada 10 Oktober 2010.

(persatuan masyarakat), reputasi, dukungan luar negeri dan kecelakaan (peristiwa mendadak).¹⁹

Menyikapi hal ini Amerika Serikat berperan secara lebih signifikan terhadap macetnya perundingan damai. Hal tersebut disebabkan karena perdamaian di Timur Tengah terutama konflik Israel dan Palestina merupakan agenda politik luar negeri Amerika Serikat. Pada Mei 2009 sejak Obama dan Netanyahu resmi sebagai presiden dan perdana menteri, untuk pertama kalinya keduanya bertemu di Washington dan membahas solusi dua negara, peningkatan perdamaian di region serta ancaman nuklir Iran.²⁰

Namun Netanyahu serta kabinet garis kerasnya tidak terlalu senang dengan solusi dua negara tersebut, sehingga pertemuan selanjutnya dengan Obama mengenai perundingan damai tidak menghasilkan kesepakatan dari pihak Netanyahu dan nihil. Fatalnya pada Maret 2010 Netanyahu memutuskan untuk menyetujui penambahan 1.600 unit pemukiman baru di Ramat Shlomo, Yerusalem Timur, tepat setelah Utusan Khusus AS untuk perdamaian George Mitchell bertemu Netanyahu. Kebijakan Netanyahu tersebut menambah kembali kecaman keras dari para mediator (*Western-backed*). Selain itu untuk tidak memperburuk hubungan baik dengan Amerika Serikat dan demi menjaga proses menuju perundingan berjalan baik, Netanyahu mengusulkan kebijakan ‘membangun kepercayaan’ di mana Israel berusaha

¹⁹ Teuku May Rudy. *Pengantar Ilmu Politik*. PT.Eresco Anggota IKAPI:Bandung, 1993, hlm.69.

²⁰ “Obama, Netanyahu Discuss U.S.-Israeli Disagreements”, http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/05/18/mideast.obama.netanyahu/index.html?eref=rss_topstories. Akses pada 2 Januari 2011.

memperbaharui negosiasi perundingan damai dan membangun kepercayaan bersama Otoritas Palestina.²¹

Usaha Netanyahu untuk memperbaiki citra Israel dengan gaung keamanan dan perdamaian tidak berjalan sesuai rencana. Peristiwa penyerangan angkatan militer Israel pada 31 Mei 2010 terhadap kapal bantuan kemanusiaan Freedom Flotilla, Mavi Marmara dari Turki semakin memperkeruh suasana kondusif dan hubungan baik dengan Gedung Putih serta merusak hubungan bilateral Israel dengan Turki. Bantuan kemanusiaan ke Gaza tersebut dicurigai Israel melibatkan bantuan persenjataan untuk gerakan ekstremis Hamas di Jalur Gaza. Sejak Hamas menang pemilu legislatif pada tahun 2006 lalu dan menguasai Jalur Gaza, Israel langsung memberlakukan blokade di tahun 2007. Sejak peristiwa Mavi Marmara Netanyahu semakin memperketat blokade dengan dalih ‘perang ekonomi’, terutama bagi para warga Gaza. Menurut rakyat Palestina sendiri gerakan tersebut muncul karena tuntutan keadaan yang minus dari kesejahteraan dan kebebasan akibat penjajahan Israel.

Kepentingan nasional yang diusung oleh para kubu sayap kanan dan ultranasionalis di Israel semakin tersalurkan dengan kembalinya Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri, sehingga kebijakan dan keputusan yang sarat akan ideologi selalu berjalan mulus sekalipun hal tersebut dapat merusak kepercayaan berbagai pihak yang turut menghidupkan suasana damai antara Israel dan Palestina. Karena

²¹ “Israel Tawarkan Opsi Perdamaian Baru”, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/03/100319_netanyahu.shtml. Akses pada 8 Oktober 2010.

ideologi nasionalisme yang begitu kuat tersebut, Israel memiliki kekuatan yang kohesif sekalipun secara kuantitas rakyat Yahudi tidak terlalu banyak, dan untuk mencapai ‘kepentingan nasional’ yang cenderung menguntungkan negaranya, Israel mengorbankan nilai dan kepentingan ‘inti’ rival mereka sehingga menciptakan konflik berbahaya²², baik konflik di internal Israel, sekutu terdekat maupun dengan pihak Palestina beserta loyalisnya. Atas hal ini, maka sangat beralasan apabila kata sepakat antara Israel dan Palestina akan sulit didapat di meja perundingan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

Mengapa perundingan damai antara Israel dan Palestina di pemerintahan periode kedua Benjamin Netanyahu menjadi tersendat-sendat?

D. Kerangka Berpikir

Kebijakan (*public policy, beleid*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang

²² K.J. Holsti. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*. Penerbit Erlangga: Jakarta, hlm.144.

membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.²³ Dalam konteks tulisan ini manuver politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada umumnya dikeluarkan untuk kepentingan sepihak dan merugikan pihak lain, yaitu Palestina. Dengan kolonisasi dan kebijakan ideologis Israel yang turun-temurun dari para elitnya sehingga mengakibatkan konflik yang berlarut-larut. Palestina juga menyiapkan prasyarat yang bertentangan dengan prinsip Israel, yaitu mendirikan negara Palestina merdeka di Yerusalem atau Tepi Barat sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah jalan buntu (*stalemate*) serta pertikaian yang berkepanjangan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu diperlukan upaya penyelesaian atau resolusi konflik yang matang.

Menurut John Burton, resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dan dalam jangka panjang merupakan proses menuju perubahan politik, sosial dan ekonomi. Burton juga menambahkan konsep *Basic Human Needs* dalam teorinya, yaitu bahwa kebutuhan dasar manusia adalah unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia sehingga konflik dan kekerasan akan muncul apabila salah satu pihak merasa bahwa kelompok lain menghalangi pemenuhan kebutuhannya. Dengan kata lain kebutuhan

²³ Miriam Budiarmo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 12.

dasar manusia tersebut mencakup identitas, pengakuan dan keamanan.²⁴ Ketika adanya kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut maka akan membuat suatu eskalasi konflik dan konflik yang berkepanjangan. Demikian, menyangkut konflik Israel dan Palestina, hambatan terbesar adalah mengubah persepsi masing-masing pihak mengenai eksistensi akan kesatuan nasional yang merupakan ancaman fundamental terhadap identitas dan keamanan kedua belah pihak.²⁵ Solusi yang paling masuk akal adalah bahwa kedua pihak yang bertikai tersebut menyelesaikan masalahnya secara analitis, didukung oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator dan bukan penguasa.

Dalam konteks konflik Israel dan Palestina, mediasi oleh pihak ketiga diperlukan sebagai fasilitator baik secara teknis maupun non-teknis, yaitu dapat mengatur pertemuan dan memformulasikan kesepakatan, mengurangi ketegangan serta dapat mengeksplorasi kepentingan masing-masing pihak dan membuat interaksi pihak yang bertikai berjalan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat berkembang menuju proses damai. Mediasi biasanya penting pada sebuah tahapan ketika paling tidak pihak-pihak yang bertikai harus menerima kenyataan bahwa melanjutkan konflik tampaknya tidak akan membuat mereka mencapai tujuan, tetapi hal ini harus dilakukan sebelum mereka mencapai tahapan untuk menerima negosiasi formal²⁶

²⁴ John Burton. *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: St. Martin 's Press, 1990.

²⁵ John Burton. *Conflict: Human Needs Theory*. New York: St. Martin's Press, 1990, hlm.284.

²⁶ Hugh Miall, et.all. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 254.

Adapun inti dari resolusi konflik adalah kemauan dan kesepakatan dari kedua pihak yang bertikai untuk membangun rasa saling percaya dan implementasi akan perdamaian yang komprehensif sehingga perlu adanya tahapan-tahapan menuju suatu resolusi konflik yang matang, seperti: 1) mencari de-eskalasi konflik, pengusung resolusi konflik berupaya melihat waktu yang tepat untuk memulai (*entry point*) proses resolusi konflik apabila ada indikasi bahwa kedua pihak bertikai menurunkan tingkat eskalasi konflik. *Entry point* dapat juga diciptakan oleh pihak ketiga tersebut; 2) intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik, ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka intervensi kemanusiaan dapat diterapkan untuk meringankan beban penderitaan para korban konflik. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan secara simultan dengan usaha untuk membuka peluang diadakannya negosiasi antar elit. Pada negosiasi tersebut akan sarat dengan berbagai orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (*political settlement*) antar aktor konflik; 3) *problem-solving approach*, yaitu adanya situasi yang kondusif bagi pihak bertikai untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi. Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks

yang menyeluruh (*total environment*)²⁷; 4) *peace-building*, yaitu meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Kegagalan dari salah satu tahap menuju resolusi konflik akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir.²⁸ Akan tetapi di pihak Israel sangat sulit untuk membangun kondisi tersebut karena konsesi dari elit yang memerintah lebih dominan daripada prasyarat resolusi konflik itu sendiri.

Oleh karena itu selain proses menuju tahapan resolusi konflik yang telah dipenuhi, penyelesaian suatu konflik belum dikatakan berhasil apabila syarat-syarat keberhasilan suatu resolusi konflik belum terpenuhi, antara lain yang mencakup:

1. Pihak-pihak yang bertikai tidak lagi berada dalam kondisi konflik,
2. Mediasi terhadap pihak-pihak terlibat konflik berhasil,
3. Adanya kesamaan persepsi antara pihak-pihak yang terlibat konflik pasca resolusi, dan

²⁷ John Burton, *Loc. cit.* hlm. 202.

²⁸ Andi Widjanto, "Empat Tahap Resolusi Konflik", <http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-04,id.html>. Akses pada 13 Desember 2010.

4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai *peacebuilding*. Komitmen dapat berupa perjanjian (*agreement*).²⁹

Manuver politik maupun kebijakan Benjamin Netanyahu merupakan suatu hambatan bagi tercapainya kesepakatan damai dengan Palestina, karena di sisi lain Palestina juga menginginkan pengakuan atas hak dasarnya sebagai pihak yang merasa kewenangannya telah dijajah oleh Israel. Pada tahap de-eskalasi keduanya sepakat untuk berunding membahas masa depan perdamaian dan ketika akan melangkah ke tahap resolusi selanjutnya, yaitu perundingan, mulai terdapat hambatan yang mengakibatkan perundingan tersebut tidak berjalan sesuai rancangan yang telah diatur. Kedua belah pihak terbentur akan kepentingan masing-masing saat akan mencapai kesepakatan atas solusi konflik. Terutama dari pihak Israel yang berat sebelah dengan menawarkan konsesi seperti status Yerusalem yang tidak dapat dibagi dan komitmen paralel yaitu apabila Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi maka Israel juga akan mengakui Palestina sebagai negara; dan masalah ekspansi pemukiman di Tepi Barat yang tidak dapat diganggu gugat.

Perundingan langsung merupakan langkah awal perundingan di periode kedua Netanyahu sebagai perdana menteri Israel. Perundingan tersebut disepakati pada tanggal 2 September 2010 dengan Israel *vis a vis* Palestina dan melibatkan Amerika Serikat mediator utama serta *The Quartet* sebagai fasilitator perdamaian. Perdamaian

²⁹ Bernard Mayer. *"The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide"*. San Fransisco: Jossey Bass, 2000, <http://www.transnational-perspectives.org/transnational/articles/article9.pdf>. Akses pada 12 Februari 2011.

di Timur Tengah khususnya antara Israel dan Palestina merupakan politik luar negeri Amerika Serikat di region tersebut.

Solusi dua negara adalah inti dari perundingan langsung yang diusulkan oleh Barack Obama. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton juga mendukung solusi dua negara dan turut mendesak Netanyahu menerima konsep tersebut. Tetapi sejak awal sudah terlihat bahwa Netanyahu mencanangkan untuk menolak formula perdamaian tersebut. Sekalipun ide tersebut diterima, Palestina harus terlebih dulu mengakui Israel sebagai negara Yahudi, yang *notabene* ditolak oleh Mahmoud Abbas. Rancangan-rancangan awal kebijakan Netanyahu sangat bertolak belakang dengan upaya perdamaian, seperti ekspansi pemukiman terutama di Tepi Barat. Netanyahu merasa perlu untuk melanjutkan kebijakan Israel dari para pendahulunya dan melihat bahwa tindakannya tersebut bukanlah untuk ‘membangun’ pemukiman baru tetapi dikarenakan adanya *natural growth* di kawasan tersebut. Kegiatan pembangunan di Tepi Barat merupakan hambatan terbesar bagi perundingan damai. Sejak tahun 2009, pemukim di Tepi Barat hampir mencapai 300.000 jiwa dan otomatis akan menambah konstruksi bangunan berikutnya. Palestina melihat dengan bertambahnya jumlah pemukim di Tepi Barat akan semakin menyulitkan Palestina untuk menciptakan suatu negara yang nyata di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur maupun Jalur Gaza. Akan tetapi Netanyahu bersikeras untuk tetap mempertahankan Yerusalem yang diklaim sebagai ibukota negara Israel dan

tidak akan membiarkan adanya transfer kekuasaan atas Yerusalem dari Israel ke Palestina.

Selain masalah status Yerusalem dan ekspansi pembangunan pemukiman di Tepi Barat, Benjamin Netanyahu juga berkompromi mengenai masalah pengungsi Palestina karena jika pengungsi Palestina diperbolehkan pulang maka akan mengancam kedaulatan negara Israel. Netanyahu juga selalu menekankan apabila Palestina bersedia mengakui Israel sebagai negara Yahudi, maka Israel siap untuk memulai perundingan damai dan mempertimbangkan prasyarat Palestina. Melihat situasi yang semakin sulit, Palestina menarik diri dari upaya perundingan damai karena sikap Israel yang mendominasi kepentingan secara sepihak di meja perundingan.

Pada akhirnya perundingan langsung (*direct negotiation*) antara Israel dan Palestina belum mencapai tahap resolusi konflik yang sempurna karena perbedaan persepsi mengenai kepentingan yang dibawa masing-masing pihak. Berbagai faktor yang kontradiktif dengan tahapan resolusi konflik menjadi latar belakang tidak terwujudnya perdamaian, yaitu:

1. Secara faktual Israel dan Palestina masih berada dalam situasi konflik, baik konflik politik maupun konflik kekerasan;

2. Peran Amerika Serikat sebagai mediator belum dapat dikatakan berhasil karena tidak mampu menjembatani Israel dan Palestina secara lebih realistis dan tegas;
3. Pada kenyataannya, sebelum dan sesudah dijalankannya perundingan langsung, Israel dan Palestina masih mengalami perbedaan persepsi mengenai konsep kepentingan nasional sehingga berakibat fatal bagi berlangsungnya maupun diimplementasikannya upaya damai; dan
4. Tidak terwujudnya komitmen dari pihak Israel maupun Palestina untuk mencapai kesepakatan damai, dalam hal ini akibat hasil dari perbedaan persepsi di mana klaim wilayah seperti Yerusalem, Tepi Barat maupun Jalur Gaza (wilayah okupasi Israel tahun 1967) maupun masalah pemukiman Yahudi menjadi poin krusial terhambatnya upaya menuju keberhasilan suatu resolusi konflik.

Pengaruh dari kebijakan Benjamin Netanyahu serta reaksi dari internal Israel maupun Palestina selama dan pasca perundingan langsung juga otomatis berkontribusi menghambat perundingan langsung yang dimulai sejak 2 September 2010, sehingga belum menghasilkan kesepakatan dan keberhasilan antara Israel dan Palestina dalam menangani konflik, sekalipun dimediasi oleh negara adikuasa seperti Amerika Serikat.

E. Argumen Pokok

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat ditarik argumen pokok: “bahwa tersendat-sendatnya pemulihan damai pada perundingan langsung di bawah pemerintahan Benjamin Netanyahu karena: 1) tidak adanya komitmen untuk menjaga proses perundingan damai akibat kebijakan Benjamin Netanyahu; dan 2) adanya perbedaan persepsi yaitu dari pemerintahan Benjamin Netanyahu di mana Israel menginginkan eksistensi negara dengan Yerusalem sebagai ibukota Israel, tetapi di sisi lain Palestina juga menginginkan kedaulatan negaranya serta Yerusalem sebagai ibukota masa depan. Akibat tidak adanya komitmen dan persamaan persepsi otomatis berdampak pada stagnasi kondisi konflik”.

F. Metode Penelitian

Dalam mengkaji tema “Tersendat-sendatnya Pemulihan Damai antara Israel dan Palestina di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu”, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan acuan data dari internet, majalah, surat kabar dan buku serta jurnal.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji :

1. Kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dituangkan dalam periode pemerintahannya yang kedua dengan kajian batasan waktu yang singkat (2009-2010) serta pengaruhnya terhadap upaya perundingan damai dengan Palestina.
2. Perundingan damai (*direct negotiation*) Israel dan Palestina yang dilaksanakan pada September 2010.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bahan pengayaan di bidang ilmu hubungan internasional khususnya kajian Timur Tengah mengenai topik tentang hubungan Israel dan Palestina yang lebih relevan dan cukup komprehensif, serta pengetahuan mengenai kebijakan signifikan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan dampak kebijakan tersebut terhadap upaya pemulihan damai dengan Palestina.

H. Batasan Penelitian

Dikarenakan potensi dapat meluasnya topik yang dikembangkan mengenai “Tersendat-sendatnya Pemulihan Damai antara Israel dan Palestina di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu”, maka penulis mengambil

rentang waktu kajian sejak dilantiknya Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel pada Maret 2009 sampai dengan terhambatnya penyelesaian konflik pasca perundingan langsung September 2010.

I. Rencana Sistematika Penulisan

Penulis akan menuangkan kajian ini ke dalam 5 bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen pokok, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang gambaran umum mengenai konflik Israel dan Palestina serta karakteristik kebijakan Benjamin Netanyahu di periode kedua pemerintahan Benjamin Netanyahu.

Bab III : Berisi tentang penjelasan mengenai tidak berjalannya pemulihan damai karena perbedaan persepsi dan ketiadaan komitmen.

Bab IV : Berisi tentang stagnasi kondisi konflik akibat terhambatnya pemulihan damai.

Bab V : Berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PERIODE KEDUA BENJAMIN NETANYAHU

Banyak aspek yang mempengaruhi konflik Israel dan Palestina, dari yang paling dasar seperti kepentingan politik untuk menguasai kontrol atas wilayah yang sama sampai dengan yang kompleks seperti aspek sejarah, agama, budaya, ekonomi dan sebagainya. Konflik telah terjadi sejak awal abad ke-20 di mana komunitas Yahudi di Palestina yang disebut *Yishuv*, memperoleh kemerdekaan Israel setelah melewati dua fase perang: pertama, perang sipil antara Israel dan rakyat Palestina; kedua, perang Israel dengan negara-negara Arab tetangganya. Setahun sejak kemerdekaannya, pada 1949 Israel bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan wilayah yang diakui dari hasil partisi gencatan senjata 1949. Wilayah tersebut kemudian bertambah dengan Israel secara *de facto* menguasai batas paling timur Palestina yang direbut dari Perang 1948 sampai wilayah hasil okupasi di Perang Enam Hari 1967 yaitu Yerusalem Timur, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan dan Semenanjung Peninsula. Aneksasi atas Yerusalem Timur menjadi semakin sah setelah pemerintahan Menachem Begin menyetujui sebuah Undang-Undang Dasar di

Knesset yang mendeklarasikan “*United Jerusalem*” sebagai ibukota abadi Israel. Namun kedutaan-kedutaan luar negeri tetap bertempat di Tel Aviv. Israel tidak pernah menganeksasi Tepi Barat, tetapi hampir setiap pemerintah Israel sejak 1967 secara langsung “berkontribusi dalam memperkuat, mengembangkan dan memperluas kegiatan pemukiman”, atau, secara tidak langsung mengizinkan konstruksi pemukiman dengan tidak menutupi atau mencegah prosesnya. Dari perspektif ideologi yang melandasi pemikiran para pemukim Yahudi, pemukiman mewakili hak rakyat Yahudi untuk tinggal di wilayah manapun di tanah Israel. Pemikiran tersebut lahir berdasarkan kaitan secara biblikal, historis, dan pertimbangan moral. Di sisi lain, rakyat Israel termotivasi untuk bermukim (seringkali didukung penuh oleh pemerintah) dikarenakan keuntungan pajak, harga rumah yang rendah, dan kesempatan kerja yang luas. Sedangkan dari perspektif Palestina, pemukiman merupakan upaya Israel untuk menguasai seluruh wilayah yang secara historis merupakan milik Palestina, selain itu juga mengingkari semangat rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) dan pada akhirnya status sebagai negara bagian.³⁰

Karena saling berseberangan perspektif itulah sehingga konflik seputar lahan dan wilayah tetap menjadi pemicu utama berlangsungnya konflik Israel dan Palestina hingga saat ini, di samping isu lainnya seperti status Yerusalem, masalah pengungsi Palestina, saling pengakuan legitimasi dan eksistensi keduanya, keamanan region dan

³⁰ Alexis Orenstein. “If You Build It, They Will Come: The Controversy Over Settlement Expansion”, <http://www.hillel.upenn.edu/kedma/04/alexis.pdf>. Akses pada 27 Mei 2011.

sebagainya. Kelangsungan aktivitas dan perluasan pemukiman Yahudi tidak hanya dilihat sebagai bentuk provokasi, namun juga menunjukkan sikap Israel yang tidak memiliki kesungguhan dan komitmen terutama menyangkut kesepakatan pertukaran “*land for peace*” yang adil. Dari perspektif Israel, terorisme yang terus berlangsung dan peningkatan aktivitas persenjataan menunjukkan ketidakseriusan dari pihak Palestina, yang juga menjadi penyebab berlangsungnya konflik.

Pemukiman Yahudi secara tidak langsung menjadi isu penyebab konflik kontemporer antara Palestina dan Israel. Banyak efek negatif yang terjadi akibat keberadaan aktivitas pemukiman di wilayah Palestina, seperti kekerasan dan diskriminasi. Ketiadaan komitmen Israel untuk menuntaskan isu pemukiman juga menjadi alasan mengapa perundingan damai selalu terhambat di isu tersebut; dikarenakan ekspansi pemukiman Yahudi adalah salah satu tujuan Zionis untuk menggerus tanah Palestina secara perlahan-lahan dan mengokupasinya dalam konsep yang lebih modern.

A. Gambaran Umum Konflik Israel dan Palestina

Akar konflik Israel dan Palestina awalnya tidak terlepas dari peranan Theodore Herzl yang menggagas pemikiran mengenai konsep Zionisme. Herzl berupaya untuk menyatukan masyarakat Yahudi yang terdiaspora dan mengalami kesamaan nasib akibat penindasan oleh Kristen Barat. Sejak 1896, implementasi dari

pemikirannya diwujudkan dalam tulisan “*Der Judenstaat*” (Negara Yahudi) yang berdampak pada munculnya imigran Yahudi (*aliyah*) yang datang dari berbagai negara ke satu wilayah tujuan, yaitu Palestina. *Aliyah* tersebut semakin mendapat pengesahan setelah Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour, mengeluarkan Deklarasi Balfour di mana Inggris secara penuh mendukung *national home* bagi rakyat Yahudi di negara Palestina. Inggris juga mengakui dan turut mendanai *World Zionist Organization* yang didirikan oleh Herzl pada 1897, yang bertujuan “*to create a Jewish political entity and ultimately a state*”. Herzl juga mengesahkan bahwa tujuan Zionisme adalah “*to establish a national home for the Jewish people secured by public law*”.³¹

Semakin meningkatnya gelombang imigrasi para Yahudi, pembelian tanah dan pemukiman Yahudi, mengakibatkan masyarakat Arab Palestina terdesak, sehingga timbullah bentrokan antara masyarakat Yahudi dan Palestina. Penduduk asli Palestina khawatir dengan terus berlangsungnya aktivitas Yahudi tersebut maka tidak mustahil suatu negara Yahudi dapat berdiri di Palestina. Pada akhirnya Inggris sebagai pemegang mandat tidak mampu menyelesaikan persoalan imigrasi dan wilayah yang menjadi pemicu berlarutnya pertikaian Yahudi dan warga Palestina, sehingga Inggris menyerahkan masalah tersebut kepada PBB.

³¹ Joel Beinin & Lisa Hajjar. “Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict: A Primer”, *loc. cit.*

Pada 29 November 1947, PBB merencanakan partisi wilayah Palestina bagi Israel dan Palestina dengan komposisi 56% bagian wilayah untuk negara Yahudi dan 43% bagian wilayah untuk negara Palestina. Sedangkan Yerusalem dan Betlehem menjadi zona internasional di bawah pengawasan PBB. Dampak dari partisi tersebut menimbulkan perlawanan dari pihak Arab Palestina terhadap Yahudi, akan tetapi angkatan militer Arab tidak mampu melawan angkatan militer Zionis yang lebih unggul, sehingga sejak 1948 Israel berhasil memegang kendali keamanan atas wilayahnya di Palestina.³²

Pada 14 Mei 1948 para pemimpin Zionis akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan negara Israel. Peristiwa ini semakin mengesahkan impian Zionis, yaitu menciptakan negara bagi rakyat Yahudi. Kolonisasi dan ekspansi Yahudi semakin mengakar di wilayah Palestina, yang menggusur masyarakat Palestina secara identitas maupun hak atas wilayah. Diaspora yang dulu dirasakan oleh Yahudi kini juga dialami oleh Palestina. Setelah negara Israel berdiri, warga Palestina yang jumlahnya tidak seberapa dengan banyaknya kuantitas imigran Yahudi dihadapkan pada dua opsi, yaitu menjadi warga negara Israel atau hidup sebagai minoritas di negara Israel. Hidup sebagai minoritas di negara Israel adalah pilihan terbaik sekaligus menyengsarakan karena mau tidak mau warga Palestina harus memilih untuk mengungsi. Jutaan warga Palestina yang terusir secara perlahan-lahan dari otoritas wilayahnya, kemudian tersebar ke berbagai negara, khususnya di Yordan, Syria dan

³² *Ibid.*

Lebanon, dan mayoritas berstatus sebagai pengungsi serta tinggal di kamp-kamp pengungsi hingga saat ini.³³

Ideologi Zionis tidak seotentik gagasan pendahulunya, Theodore Herzl.³⁴ Salah satunya adalah mendirikan suatu negara tidaklah cukup bagi Israel. Tidak hanya Tepi Barat (yang diklaim Israel dengan nama Yudea dan Samaria secara biblikal), Sinai dan Dataran Tinggi Golan serta Jalur Gaza yang berhasil diokupasi oleh Israel dan angkatan militernya; Yerusalem yang ditentukan oleh PBB sebagai zona internasional juga berhasil dianeksasi serta diklaim sebagai ibukota abadi oleh Israel. Sementara di sisi lain, warga Arab Palestina juga menginginkan Yerusalem dan Tepi Barat sebagai ibukota bagi negara Palestina.³⁵

Periode eskalasi konflik sejak 1948 hingga saat ini memberikan pengaruh bagi dinamika konflik, antara kolonisasi, perang dan negosiasi damai. Konflik Israel dan Palestina yang pada awalnya bermula dari tujuan untuk mendirikan *national home* bagi rakyat Yahudi, berkembang menjadi isu politik dan permainan kepentingan. Bahkan campur tangan PBB juga tidak kunjung memberikan resolusi yang adil bagi rakyat Palestina. Sejak gencatan senjata pada perang Arab-Israel tahun 1949, Israel dan Arab Palestina menandatangani perjanjian gencatan senjata (*armistice lines*), yaitu negara yang diketahui sebagai negara Palestina harus dibagi dengan Israel

³³ *Ibid.*

³⁴ Jehuda Reinharz & Anita Shapira. *loc.cit.*

³⁵ Zachary Lockman & Joel Beinin. *Intifada, the Palestinian Uprising Against Israeli Occupation*. New York : I.B Tauris Publishers London, 1989.

mengontrol 77% dari keseluruhan wilayah dan Yordan menguasai Yerusalem Timur serta sebagian Tepi Barat. Sedangkan Mesir mengambil alih Jalur Gaza. Sementara bagi masyarakat Palestina, negara Palestina hasil partisi PBB 1947 tidak akan pernah menjadi milik mereka.³⁶

Nasib konflik Israel dan Palestina bergantung pada kebijakan elit kedua negara tersebut, terutama dari pihak elit Israel. Ideologi Zionisme yang dipertaruhkan dalam setiap pemerintahan elit di Israel diwarnai dengan kepentingan politik dan historis. Sejak awal dideklarasikan sebagai negara, Israel pertama kali diperintah oleh Partai Buruh (*Miflegel Ha'avoda Ha-Israelit*) dalam rentang waktu 1967-1977. Kelompok Buruh berasal dari golongan para pekerja Yahudi di Palestina dan termasuk para imigran Yahudi yang datang pada awal abad 20-an (*Histadrut*). Partai Buruh juga menerapkan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Jalur Gaza tetapi dengan menekankan pada konsep pertanian. Partai Buruh termasuk partai yang moderat dan sekuler terutama menyangkut konflik dengan Arab Palestina serta masih dapat kompromi atas sengketa wilayah yang menjadi akar permasalahan konflik. Sedangkan Partai Likud berhasil memerintah Israel pada 1977 dan tidak memiliki kompromi atas apapun yang menjadi hak Palestina. Likud terbentuk dari Herut (*Freedom*) Party, yaitu partai yang terdiri dari organisasi Zionis pra kemerdekaan, seperti *Betar Youth Movement* dan *ETZEL (National Military Organization)* dan menjadi partai sayap kanan terbesar di Israel. Berasal dari para imigran Yahudi Eropa

³⁶ *Ibid.*

dan berimigrasi akibat tekanan dan kekejaman Nazi, Likud menjadi partai dengan sentimen rasis, terutama terhadap bangsa Arab di Palestina. Sama seperti Buruh, Partai Likud juga menerapkan pembangunan pemukiman tetapi dengan konsep yang berbeda yaitu demi terwujudnya *Eretz Yisrael* (Israel Raya) bagi bangsa Yahudi.³⁷

Adapun perkembangan positif dalam hubungan Israel dan Palestina, yaitu sejak dimulainya perundingan resmi yang dimediasi oleh Amerika Serikat tahun 1991 dalam *Declaration of Principles on Palestinian Self-Rule in the Occupied Territories* di Madrid. Selanjutnya perundingan damai antara Israel dan Palestina berjalan seiring dengan stagnasi konflik yang tidak menemui solusi yang tepat karena pihak Israel cenderung tidak berkomitmen untuk berdamai dengan Palestina. Situasi ini biasanya terjadi pada pemerintahan partai sayap kanan, namun tidak menutup kemungkinan terjadi stagnasi konflik di pemerintahan sayap kiri dan tengah.

Dengan latar belakang historis partai yang sarat dengan ideologi Zionis, Partai Likud selalu memiliki tendensi kuat untuk memperluas wilayah kekuasaan terutama dengan pembangunan pemukiman. Adanya kepentingan nasional yang kuat dari para elit Israel tersebut akan selalu menjadi penghalang bagi tercapainya kesepakatan damai dengan Palestina. Perundingan damai antara Israel dan Palestina hanyalah sebatas formalitas belaka, kedua pemimpin bertemu, menghadiri konferensi damai bahkan menandatangani perjanjian damai, akan tetapi apabila proses damai yang tidak menyeluruh ke sumber yang lebih intens (*deep-rooted*) maka semuanya akan menjadi

³⁷ Hamdan Basyar. *Loc. cit.*

sia-sia. Kondisi hubungan Israel dan Palestina yang berpola konflik-perundingan damai-konflik dapat menjadi *vicious circle* yang tidak akan ada akhirnya.

Benjamin Netanyahu yang konservatif memiliki pengaruh signifikan terhadap berkembangnya isu konflik dan berhasilnya perundingan damai. Di masa pemerintahannya Netanyahu selalu menekankan isu keamanan dan kesatuan nasional. Setiap kebijakannya berasal dari ideologi partai yang ekstrem dan tidak bertoleransi, terutama menyangkut status Yerusalem. Netanyahu juga mewakili suara masyarakat Israel garis keras dan pro-pemukiman.

Hubungan Israel dan Palestina di pemerintahan Netanyahu tidak selalu berjalan mulus bahkan cenderung meningkat ke ketidakstabilan dikarenakan prinsip Netanyahu yang salah satunya tidak berkenan dengan penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan. Ia juga menolak ide *two state solution* dan tidak bertanggung jawab atas nasib dan hak bangsa Palestina, baik dari keinginan rakyat Palestina atas wilayah 1967 maupun para pengungsi Palestina yang terlantar akibat peningkatan jumlah penduduk Yahudi di Palestina. Netanyahu pun cenderung ekspansif dalam membangun pemukiman dan hal tersebut menjadi salah satu alasan macetnya perundingan damai. Beberapa perundingan damai yang berlangsung selama masa Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri antara lain: *Oslo process* (1993-2001), *Hebron Agreement* (1997), *Wye River Agreements* (1998-1999), dan yang terbaru *Direct Negotiations* (2010).

Kurangnya komitmen Netanyahu dalam setiap perundingan damai menjadi hambatan terbesar terhadap masa depan hubungan Israel dan Palestina. Setiap prasyarat yang ditawarkan oleh Palestina selalu mendapat reaksi keras dari Netanyahu. Dengan sikap tersebut maka akan sangat berdampak negatif terhadap kestabilan pemerintahan internal Israel dan semakin memburuknya konflik dengan Palestina.

Di subbab selanjutnya akan dibahas mengenai kebijakan Benjamin Netanyahu yang diangkat di periode kedua ia menjabat sebagai perdana menteri Israel sejak 2009 dengan batasan waktu sampai 2010. Kebijakan Netanyahu di pemerintahan keduanya ini menarik untuk dikaji karena pendekatan Netanyahu yang lebih agresif dan *hawkish* dibanding periode pertamanya sebagai perdana menteri tahun 1996-1999, selain itu juga lebih relevan seiring dengan terus berlangsungnya konflik dengan Palestina sebagai konflik kontemporer.

B. Karakteristik Kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu 2009-2010

Pada 10 Februari 2009 Israel mengadakan pemilihan umum legislatif akibat ketidakmampuan Tzipi Livni membentuk koalisi untuk menggantikan Ehud Olmert yang bermasalah di pemerintahannya. Pemilihan umum seharusnya dimenangkan oleh Livni, akan tetapi Livni gagal menggalang lobi dengan partai lain. Hal ini

disebabkan mayoritas partai yang lolos *threshold* dua persen adalah partai sayap kanan dan partai ortodoks. Di sisi lain Netanyahu berhasil menggalang lobi dengan partai-partai sealiran seperti Yisrael Beiteinu, Shas, Jewish Home bahkan Partai Buruh. Disahkan sebagai perdana menteri Israel di hadapan Knesset pada 31 Maret 2009, Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri Israel periode kedua. Perundingan damai dengan Palestina merupakan tanggung jawab bagi Netanyahu dan koalisinya untuk selangkah lebih maju. Palestina merupakan “*partner of peace*” bagi Netanyahu, tetapi dengan syarat yang mengikat, yaitu Netanyahu menginginkan Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Sikap Netanyahu terhadap upaya pemulihan damai dengan Palestina tidak berbeda jauh dari periode pertamanya sebagai perdana menteri Israel. Pada perundingan Hebron dan *Wye River Memorandum*, Netanyahu melakukan *walk out* karena tidak setuju atas penyerahan wilayah dan penarikan pasukan Israel dari daerah okupasi. Di periode keduanya kali ini Netanyahu melakukan metode baru dengan menerapkan apa yang ia sebut sebagai komitmen paralel dan akan menjadi isu baru apabila pihak Palestina tidak bersedia memenuhinya. Komitmen paralel tersebut menjadi syarat fundamental Netanyahu untuk berunding dengan Palestina dan mencakup dua hal, yaitu: 1) Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi, termasuk dengan menanggukkan setiap klaim untuk kembali ke Israel, sinyal-sinyal untuk menghancurkan negara Israel serta mengakhiri setiap klaim atas hal lainnya; 2) Israel mengakui negara Palestina di masa depan dengan syarat bahwa Palestina

bersedia didemiliterisasi. Dengan konsep demiliterisasi, Israel berupaya untuk menghindari ancaman keamanan setelah negara Palestina terbentuk, yaitu dengan hadirnya Iran maupun sekutu-sekutu Iran atau penyelundupan senjata dari Iran maupun Syria di Palestina. Dengan tegas Netanyahu tidak akan membicarakan mengenai solusi apapun, tanpa membicarakan dua syarat utama tersebut.³⁸

Netanyahu menunjukkan sikap kerasnya dengan mengangkat Avigdor Lieberman Ketua Partai Yisrael Beiteinu yang ultranasionalis sebagai menteri luar negeri Israel. Lieberman juga bersedia merealisasikan konsep *peaceful co-existence* dengan Palestina namun dengan prasyarat demiliterisasi negara Palestina. Bagi Netanyahu perundingan damai dengan Palestina dapat terwujud tanpa teror dan pertumpahan darah. Pihak Palestina melihat keganjilan bahwa Netanyahu tidak mengungkit mengenai masalah pengakuan negara Palestina dan penghentian pembangunan Yahudi di Tepi Barat, Yordan.

Kebijakan serupa pada periode pertama Netanyahu memerintah adalah menerapkan *security based diplomacy*, yaitu keamanan adalah prioritas setelah itu baru perdamaian. Ia menegaskan sekalipun perdamaian dapat dicapai, Israel harus terlebih dahulu menjamin keamanan dari berbagai aspek. Palestina menginginkan wilayah okupasi 1967 menjadi negara masa depan, dan setelah Israel menarik

³⁸ "PM Netanyahu's Speech at the General Assembly of the Jewish Federations of North America in New Orleans", <http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/PMSpeaks/speechga081110.htm>. Akses pada 16 Februari 2011.

kekuasaan dari wilayah tersebut, Netanyahu memastikan bahwa tidak ada infiltrasi yang datang baik dari Iran maupun sekutu-sekutunya.³⁹

Menanggapi desakan Amerika Serikat mengenai kelanjutan perundingan damai berbasis *two state solution*, Netanyahu kembali menegaskan prinsip yang menurutnya menjadi dasar kebijakannya, yaitu: 1) pengakuan Palestina bahwa Israel sebagai negara Yahudi. Hal ini berdasarkan pada sejarah Israel sebagai tanah yang dijanjikan di mana Yudea dan Samaria (Tepi Barat) adalah menjadi tempat berkumpulnya bangsa Yahudi yang terdiaspora; 2) demiliterisasi negara Palestina. Netanyahu bersikeras apabila Palestina menjadi negara dan berdampingan dengan Israel, maka Israel terlebih dahulu memastikan tidak akan ada ancaman yang datang dari luar Palestina dan mengancam stabilitas keamanan Israel. Netanyahu bersedia menerima dan mengakui negara Palestina yang non-militer dan tanpa persenjataan, sehingga secara tidak langsung Israel mengontrol dan menguasai keamanan baik darat maupun udara di Palestina, terutama di Jalur Gaza.⁴⁰ Syarat tersebut sangat memberatkan pihak Otoritas Palestina dan mustahil untuk direalisasikan, tetapi pada kenyataannya Netanyahu berpedoman teguh pada prinsip tersebut. Netanyahu bukanlah sosok moderat dalam menyikapi perundingan damai, sekalipun ia bersikeras berperan aktif dalam proses damai, ia juga tidak lepas dari kepentingan

³⁹ Dan Diker. "Israel's Return To Security Based-Diplomacy", <http://www.icpa.org/text/security/diker.pdf>. Akses pada 14 Maret 2011.

⁴⁰ "Prime Minister's Foreign Policy Speech at the Begin-Sadat Center at Bar-Ilan University, June 14, 2009", *loc. cit.*

pemerintahannya yang mengatasnamakan kepentingan nasional (Zionisme) yang menjadi dasar penjajahan Israel terhadap Palestina.

Pada 25 November 2009 Netanyahu mengumumkan kebijakan moratorium pemukiman selama 10 bulan yang mencakup Tepi Barat dan tidak termasuk Yerusalem. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut direalisasikan karena keinginan kuat Israel untuk berdamai dengan Palestina. Netanyahu juga menyatakan sejak pemerintahannya berjalan Israel telah mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kehidupan serta hubungan baik dengan Palestina, yaitu dengan membongkar ratusan penghalang jalan dan pos-pos penjagaan, menambah jam operasi (penjagaan) di *Allenby Bridge* dan menghapus hambatan-hambatan birokrasi untuk kemajuan ekonomi Palestina.⁴¹

Namun secara bersamaan dengan dimulainya pembekuan pemukiman, Netanyahu menyiratkan akan melanjutkan konstruksi pemukiman setelah pembekuan berakhir. Di sisi lain, Otoritas Palestina menolak pembekuan pemukiman yang bersifat parsial dan temporer. Bagi Mahmoud Abbas kebijakan pembekuan secara parsial bukanlah kebijakan yang nyata dan tidak pantas dikatakan pembekuan.

Kebijakan yang berakhir pada 26 September 2010 bukan waktu yang cukup bagi Palestina untuk menegosiasikan ulang konsesinya. Selama proses perundingan damai, Mahmoud Abbas mengemukakan syarat agar Netanyahu memperpanjang

⁴¹ "Statement by PM Netanyahu on the Cabinet Decision to Suspend New Construction in Judea and Samaria", *loc. cit.*

waktu moratorium dan meliputi Yerusalem. Bagi Abbas hal tersebut seharusnya dipenuhi Netanyahu untuk menjaga atmosfer perundingan damai, di sisi lain Abbas juga tidak ingin ekspansi pemukiman akan menyengsarakan warga Palestina yang masih bermukim di Tepi Barat maupun Yerusalem. Namun Netanyahu tidak bersedia menambah waktu pembekuan konstruksi. Menurutnya Palestina telah menyia-nyiakan waktu selama 10 bulan untuk menentukan sikap mengenai upaya damai dengan Israel. Netanyahu berharap sikap Palestina tersebut bukanlah suatu alasan untuk menghindari setiap prasyarat dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman setali tiga uang dengan sikap Netanyahu, *"the Palestinians failed to accept the gesture of the moratorium for ten months and now they are pressuring Israel to continue the very freeze they rejected."* Lieberman juga mendukung kebijakan Netanyahu terhadap Palestina untuk memulai perundingan damai tanpa prasyarat.⁴²

Di sisi lain Amerika Serikat mendesak Israel untuk memperpanjang masa moratorium. Berbagai isu berkembang di internal Israel bahwa Netanyahu bersedia untuk menunda kembali pembangunan pemukiman, namun dengan syarat dari perdana menteri tersebut, yaitu apabila Palestina bersedia mengakui Israel sebagai negara bagi rakyat Yahudi. Otoritas Palestina dengan tegas menolak dan menuding *freeze-for-recognition* dari Netanyahu tersebut sebagai upaya untuk melemahkan posisi Barack Obama di Timur Tengah serta tidak fokus pada isu utama dalam

⁴² JPost.com Staff. Lieberman: PA Refused to Accept Freeze for 9 Months", <http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=189438>. Akses pada 13 Oktober 2010.

negosiasi damai. Palestina mengalami dilema dengan syarat yang diajukan oleh Netanyahu tersebut.

Selain Amerika Serikat, PBB dan komunitas internasional juga menyesalkan tindakan sepihak Netanyahu yang menyalahi hukum internasional dan hukum kemanusiaan. Namun perdana menteri Israel tersebut bergeming, bahkan setelah pembekuan berakhir ia membiarkan para ekstremis Yahudi meneruskan pembangunan pemukiman. Beberapa konstruksi yang sengaja ditunda di Yerusalem juga dilanjutkan. Netanyahu berdalih apabila ia menambah waktu moratorium maka akan berefek negatif terhadap koalisi kabinet sayap kanannya. Avigdor Lieberman yang pro-pemukiman menyambut baik berakhirnya kebijakan tersebut.

Bagi Netanyahu, kebijakan moratorium temporer di Tepi Barat merupakan langkah besar yang pernah diambil oleh pemerintahan di Israel, tetapi sepertinya tidak bagi Mahmoud Abbas. Keinginannya agar moratorium diberlakukan secara komprehensif, terutama di Yerusalem, tidak dipenuhi. Maka sangat logis apabila pemukiman Israel menjadi ganjalan utama dalam perundingan damai, selain permasalahan inti lainnya seperti perbatasan, status Yerusalem, para pengungsi Palestina dan masalah keamanan.⁴³

⁴³ "Key Principle of the Peace Process".

http://www.aipac.org/Publications/AIPACAnalysesMemos/Key_Principles_of_the_Peace_Process.pdf
. Akses pada 14 Maret.

Pemerintahan Netanyahu telah menyetujui proposal pembangunan pemukiman di Tepi Barat sebanyak 13.000 unit bangunan⁴⁴ dan menyetujui pembangunan unit baru di Yerusalem sebanyak hampir 240 unit bangunan baru. Di hari pertama berakhirnya moratorium, MK (*Member of Knesset*) Likud Danny Danon yang ultranasionalis bersama masyarakat Israel pro-pemukiman merayakannya dengan peletakan batu pertama di Tepi Barat sebagai tanda dimulainya kembali pemukiman Israel. Danon bahkan mengatakan bahwa moratorium tidak menghasilkan manfaat apa-apa, perundingan damai tidak, kekerasan pun tidak dan bahwa ia sangat mendukung keputusan Netanyahu mengakhiri pembekuan.⁴⁵

Perundingan langsung yang dimulai pada 2 September 2010 menjadi upaya damai yang pertama di periode kedua Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel, namun mengalami kebuntuan akibat ekspansi pemukiman Israel dan tidak terwujudnya prasyarat dari Palestina bahwa Israel harus menghentikan total kegiatan pemukiman. Konsekuensi atas gagalnya perundingan langsung adalah masa depan hubungan Israel dan Palestina akan mengalami situasi yang lebih sulit. Terlebih antara Netanyahu dan Abbas memiliki perbedaan komitmen yang menjadi penghalang keduanya mencapai rekonsiliasi, yaitu Abbas bersedia berunding apabila Israel menghentikan aktivitas pemukiman Yahudi dan menegaskan bahwa mengakui Israel sebagai negara Yahudi tidak dapat direalisasikan dan tidak ada kaitannya

⁴⁴ Hamdan Basyar. "Ganjaan Perdamaian Palestina dan Israel". *Loc. cit.*

⁴⁵ "The Bibi Report", <http://bibireport.blogspot.com/2010/09/mk-danny-danon-to-obama-respect-right.html>. Akses pada 21 Oktober 2010.

dengan perundingan damai, namun Netanyahu juga bersikeras menyodorkan prinsip pengakuan negara Israel untuk memenuhi prasyarat Abbas tersebut.

Dengan adanya perspektif dan ketiadaan komitmen Netanyahu yang melandasi kebijakan maupun keputusannya sehingga secara faktual berdampak negatif terhadap hubungan maupun upaya damai dengan Palestina. Perspektif dan komitmen yang berseberangan antara Netanyahu dan juga Abbas akan dibahas secara spesifik di bab selanjutnya sehingga dapat ditarik benang merah mengenai kebutuhan fundamental yang mendasari keduanya bersikap saling kontradiktif.

BAB III

TIDAK BERJALANNYA PEMULIHAN DAMAI KARENA PERBEDAAN PERSEPSI DAN KETIADAAN KOMITMEN

Perang Enam Hari antara Arab dan Israel pada 5 Juni 1967 menjadi titik utama timbulnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina, yang dimulai mengenai permasalahan wilayah di mana Israel berhasil merebut Tepi Barat dari Yordania, Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir, serta Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur merupakan daerah kekuasaan Yordania di mana rakyat Palestina mendapat kewarganegaraan dan hidup di wilayah tersebut. Sejak Perang Enam Hari Israel membentuk pemerintahan militer untuk mengatur penduduk Palestina di wilayah okupasi Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang pada kenyataannya mengekang hak-hak dasar rakyat Palestina. Selain itu, pemerintah Israel membangun ratusan rumah serta mengizinkan ratusan ribu rakyat Yahudi untuk pindah ke Tepi Barat dan Jalur Gaza, walaupun hal tersebut melanggar hukum internasional. Pada 1981, Israel mengesahkan wilayah jajahannya yaitu dengan menganeksasi Yerusalem Timur dan mengklaimnya sebagai “ibukota abadi” Israel, di sisi lain pihak Arab menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.

Oleh karena itu selama beberapa dekade sampai saat ini konflik Israel dan Palestina terus dipicu dengan masalah pemukiman Yahudi dan saling klaim wilayah, sedangkan wacana solusi dua negara yang menjadi basis negosiasi damai antara Israel dan Palestina akan dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki komitmen untuk ‘perdamaian dan hidup berdampingan secara aman’. Selain itu, peran mediator dalam konteks ini adalah Amerika Serikat dan juga intervensi dari masyarakat internasional, sangat diperlukan untuk selalu menghidupkan upaya damai serta berkompetensi menyentuh aspek-aspek fundamental kedua pihak berkonflik, baik secara historis maupun psikologis. Upaya mediasi tersebut diharapkan dapat menjembatani konflik kedua belah pihak secara lebih kondusif, dengan kata lain apabila Amerika Serikat memiliki komitmen penuh menjadi fasilitator yang tegas. Akan tetapi pada kenyataannya, dengan perbedaan persepsi dan tidak adanya komitmen yang kuat antara pemerintah Israel dan Palestina terhadap upaya damai, ditambah dengan kurangnya komitmen dari pihak mediator, sehingga dapat dipastikan kondisi konflik tidak hanya meningkat, namun juga perundingan damai hanya berjalan di tempat.

A. Persepsi Israel tentang Perundingan dan Ketiadaan Komitmen

Mengacu pada gambaran konflik Israel dan Palestina di bab sebelumnya bahwa pihak yang mendominasi sekaligus menjajah adalah Israel. Ideologi Zionis

telah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan bersifat politis dan religious berlangsung dari masa ke masa pemerintahan Israel, baik dari partai moderat (kiri) maupun dari partai ultranasionalis (kanan).

Persepsi dan ketiadaan komitmen Benjamin Netanyahu akan dibahas dalam bab ini, yang secara tidak langsung mewakili kepentingan nasional Israel (dalam konteks ini, Zionisme). Walaupun dari Israel sendiri terbagi ke dalam dua haluan masyarakat, yaitu ekstremis Yahudi yang pro-pemukiman dan aktivis pro-perdamaian atau anti-pemukiman, seperti *Peace Now* maupun *J-Street*; dikarenakan ideologi yang mempengaruhi setiap kebijakan para elit di Israel yang secara estafet mempengaruhi kebijakan *government to government* sehingga meredam gerakan-gerakan perdamaian bahkan partai kiri (*dovish*) yang moderat sekalipun. Akibat kebijakan fundamentalis partai kanan di bawah Netanyahu tersebut sehingga menimbulkan reaksi dari rival abadi, Palestina. Reaksi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pertahanan dari pihak Palestina serta memperjuangkan hak atas wilayah yang telah dirampas oleh Israel.

1. Persepsi Israel Tentang Perundingan

Pada periode kedua Benjamin Netanyahu terpilih sebagai perdana menteri Israel, ia telah dihadapkan pada gagasan *two state solution* yang menjadi topik perundingan langsung dengan Palestina. *Two state solution* adalah solusi di mana negara Israel dengan jaminan keamanan seperti yang telah dikondisikan akan hidup

berdampingan dengan negara Palestina merdeka (*peaceful co-existence*). Netanyahu sendiri bersedia melanjutkan perundingan damai dengan Palestina yang sempat vakum karena dibekukan oleh Mahmoud Abbas setelah penyerangan Israel terhadap Gaza dalam Operasi *Cast Lead*. Hal tersebut diuraikan Netanyahu dalam pidatonya di AIPAC Policy Conference, 4 Mei 2009 mengenai pendekatan yang akan diambil menyangkut hubungan dengan Palestina. Pendekatan tersebut disebut *Triple-track* dan mencakup:

1. Jalur politik, yaitu berfokus pada perundingan damai tanpa prasyarat dan tanpa penundaan.
2. Jalur keamanan, yaitu memperkuat ‘aparatus keamanan’ Palestina.
3. Jalur ekonomi, yaitu Israel bersedia menyingkirkan segala hambatan demi kemajuan ekonomi Palestina.⁴⁶

Menurut Netanyahu, dengan mengaplikasikan pendekatan *Triple-track* tersebut, terutama pada jalur ekonomi Palestina, maka akan dapat dicapai *economic peace*, yaitu sebagai strategi Israel dalam meningkatkan aspek ekonomi di region Arab bersama Palestina. *Economic peace* bukanlah sebagai substitusi terhadap *political peace*, akan tetapi sebagai upaya untuk mencapai *political peace* itu sendiri.⁴⁷ Implementasi pendekatan ini dibuktikan, seperti yang telah diuraikan di bab

⁴⁶ “PM Benjamin Netanyahu: AIPAC Policy Conference 2009 May, 4 2009”, <http://www.aipac.org/Publications/SpeechesByPolicymakers/PMNetanyahuPC09.pdf>. Akses pada 10 Januari 2011.

⁴⁷ “Prime Minister’s Foreign Policy Speech at the Begin-Sadat Center at Bar-Ilan University, June 14, 2009”, The Israel Project. *Loc. cit.*

sebelumnya, yaitu dengan upaya Netanyahu membongkar ratusan penghalang jalan dan pos-pos penjagaan milik IDF (*Israel Defend Force*) yang selama ini menjadi penghambat ekonomi rakyat Palestina, selain itu juga menambah jam operasi selama 24 jam di *Allenby Bridge*, perbatasan Yordan, di mana sering terjadi tindakan anarkis dan teror. Dengan adanya kebijakan tersebut sehingga memudahkan rakyat Palestina melakukan perdagangan dan peningkatan ekonomi setempat, terutama di kawasan Tepi Barat.

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Tony Blair mendukung tindakan Netanyahu dalam menghidupkan ekonomi Palestina yang sempat suram sejak *intifada* kedua tahun 2000. Blair menyatakan setelah keamanan dan ekonomi dicapai maka Israel dan Palestina dapat menuju ke tingkat politik. Petinggi Otoritas Palestina menolak adanya kontribusi Netanyahu di Tepi Barat, sebab aktivitas ekonomi meningkat karena investasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Otoritas Palestina Salam Fayyad. Mahmoud Abbas bersikukuh bahwa upaya politik dapat dicapai apabila Israel terlebih dulu memutuskan masalah pemukiman Yahudi.

Namun secara bersamaan ketika kebijakan ‘murah hati’ Netanyahu tersebut disampaikan, ia juga menyiratkan sifat defensif dengan poin-poin dari pandangannya mengenai kepentingan Israel yang secara tidak langsung berhubungan dengan Palestina, yaitu:

1. Perdamaian tidak akan terwujud tanpa keamanan. Apabila Israel tidak mengutamakan keamanan, maka tidak akan pernah ada keamanan bahkan perdamaian. Netanyahu sendiri menegaskan tidak akan pernah kompromi mengenai keamanan Israel.
2. Agar kesepakatan final perundingan damai tercapai, Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Palestina harus mengakui Israel sebagai sebuah negara bagi rakyat Yahudi.⁴⁸

Pada 19 Mei 2009 untuk pertama kalinya Benjamin Netanyahu dan Barack Obama bertemu di Gedung Putih dan membahas perundingan damai. Dalam pembicaraan tersebut, Obama mendesak Netanyahu untuk menyetujui solusi dua negara dan menghentikan aktivitas pemukiman Yahudi baik di Tepi Barat maupun di Yerusalem. Netanyahu menanggapi permintaan Obama tersebut serta menyikapi upaya damai dengan Palestina yang diuraikan dalam pidato kontroversialnya di Bar Ilan, 14 Juni 2009. Sikap Netanyahu jelas bertentangan dengan gagasan *two state solution*, yang mengharuskan berdirinya negara Palestina, dengan menyatakan dua prinsip yang menjadi dasar kebijakannya ke depan dan berpengaruh terhadap kesepakatan damai, yaitu pertama *recognition*, adalah Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi; kedua *demilitarization*, adalah apabila negara Palestina

⁴⁸ "PM Benjamin Netanyahu: AIPAC Policy Conference 2009 May, 4 2009", *loc. cit.*

terbentuk maka Israel berhak mengontrol angkatan militer Palestina baik udara, laut maupun darat.⁴⁹

Selain itu Netanyahu bersedia mengakhiri konflik dengan Palestina dengan tanpa prasyarat dan tanpa penundaan. Secara eksplisit dalam pidatonya, Netanyahu mengakui negara Palestina, “*we do not want to rule over them, we do not want to govern their lives, we do not want to impose either our flag or our culture on them*”,⁵⁰ namun pada hakikatnya ia menolak menyerahkan wilayah jajahan 1967 yang seharusnya menjadi wilayah berdirinya negara Palestina. Netanyahu terkesan menerapkan *double-standard*, di satu sisi ia menyetujui pembicaraan damai namun di sisi lain ia menawarkan prasyarat yang kontradiktif dengan kepentingan Palestina sehingga realitas akan perdamaian semakin sulit untuk diwujudkan. Dari pidatonya di Bar Ilan tersebut dapat dianalisa perspektif/pandangan yang menjadi haluan kebijakan dan berpengaruh terhadap hubungan/perundingan damai dengan Palestina, antara lain:

1. Tanah Israel adalah hak bangsa Yahudi sehingga Israel dapat menentukan prasyarat untuk mencapai perdamaian.
2. Yerusalem tidak akan pernah dibagi.
3. Israel tidak akan mengizinkan kembalinya para pengungsi Palestina karena hal tersebut dapat mengancam eksistensi negara Yahudi.

⁴⁹ “Prime Minister’s Foreign Policy Speech at the Begin-Sadat Center at Bar-Ilan University, June 14, 2009”, The Israel Project. *loc. cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

4. Israel tidak akan bernegosiasi dengan Hamas.
5. Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi.⁵¹

Dengan pandangan seperti itu, Netanyahu tidak hanya menjauhkan Israel dari meja perundingan namun secara sepihak menutup celah negosiasi. Adanya konsep “*security first*” yang merefleksikan kebijakan pemerintahan Israel sejak 1967, diangkat Netanyahu dalam konteks menghadapi isu nuklir Iran dan *Al-Qaeda* yang sedang berkembang di kawasan Timur Tengah. Sedangkan Iran maupun Palestina saling berkaitan satu sama lain terutama dengan munculnya gerakan militan anti Israel, sehingga apabila negara Palestina kelak berdiri, Netanyahu telah membatasinya dengan konsep demiliterisasi demi keamanan Israel.

Barack Obama tidak bisa berdiam diri menyaksikan sikap defensif Netanyahu, terlebih dalam pidatonya di Kairo beberapa hari sebelum pidato Netanyahu di Bar Ilan, ia menyatakan komitmennya untuk mendukung negara Palestina merdeka serta meminta Israel untuk menghentikan aktivitas pemukiman yang selama ini menjadi ganjalan perdamaian. Obama terus mendesak Netanyahu untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menghidupkan proses damai dengan Palestina.

Pada 25 November 2009 di hadapan *Cabinet Decision*, Netanyahu akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan pemukiman, yang menurutnya merupakan keinginan terdalam Israel terhadap

⁵¹ Ami Isseroff. “Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s Policy Address”, http://www.mideastweb.org/netanyahu_june_14_speech.htm. Akses pada 16 Desember 2010.

perdamaian. Netanyahu menyatakan bahwa langkah tersebut adalah keputusan yang sangat besar dan sulit demi meraih perdamaian, sehingga ia pun mengharapkan agar Palestina melakukan timbal balik. Hal tersebut sangat lumrah mengingat karakter Netanyahu dan koalisi sayap kanannya yang kontras dengan upaya damai, selain itu kebijakan moratorium menjadi kebijakan yang historis dalam pemerintahan Israel selama ini. Kebijakan moratorium pemukiman temporer tersebut berlangsung selama 10 bulan sejak November 2009 sampai September 2010 dan berlaku secara parsial, yaitu hanya di wilayah Tepi Barat dan tidak termasuk Yerusalem.

Netanyahu kembali mengajukan seruannya kepada Palestina untuk menerima moratorium dan secepatnya menuju meja perundingan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato di *Knesset Special Session* sebulan setelah moratorium diumumkan, “*internal cohesion is the most important thing that will allow us to achieve two tasks: defending ourselves against attacks on our right to self-defense and ensuring that the Palestinian Authority comes to the negotiating table*”. Netanyahu juga menjabarkan masalah-masalah primer yang menjadi ancaman pertahanan Israel, seperti ancaman nuklir Iran, ancaman misil seperti roket dan bom dari para teroris serta laporan Goldstone. Richard Goldstone ialah utusan PBB yang membuat laporan dari hasil investigasi berupa data kegiatan Israel seperti blokade, tembok pemisah dan

pemukiman. Netanyahu menganggap bahwa laporan tersebut menjadi ancaman atas upaya defensif Israel.⁵²

Namun Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak dapat berunding mengenai solusi tanpa menegosiasikan dua prinsip yang ia tawarkan di Bar Ilan sebelumnya, yaitu *recognition* dan demiliterisasi, yang menjadi syarat fundamental. Israel memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan perundingan berdasarkan dua prinsip tersebut dan menurut Netanyahu Palestina belum juga merespons ajakan Israel untuk secepatnya berunding.⁵³ Pada 9 Mei 2010 Netanyahu menyelesaikan tahap *indirect proximity talks* setelah Utusan Khusus George Mitchell berkunjung dan mendapat komitmen dari Netanyahu untuk melangkah ke proses damai selanjutnya. Mitchell menyatakan bahwa perdana menteri Israel tersebut setuju untuk menghentikan proyek pemukiman di Yerusalem Timur, sebagaimana yang diminta oleh pihak Palestina.

Pada Agustus 2010, Amerika Serikat mengumumkan waktu perundingan langsung yang telah disepakati dan berlangsung dalam dua putaran, yaitu pada 2 September 2010 dan 14-15 September 2010. Netanyahu mendukung tenggat waktu satu tahun penyelesaian upaya damai yang ditentukan oleh Barack Obama. Putaran pertama perundingan langsung 2 September 2010 dilakukan di Washington D.C. Proposal yang akan dibahas menjadi isu familiar, yaitu perbatasan 1948-1967 dengan

⁵² "Excerpts from PM Netanyahu's Speech at the Knesset Special Session", <http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2009/PM-Netanyahu-addresses-%20Knesset-Special-Session-23-Dec-2009>. Akses pada 10 Oktober 2010.

⁵³ *Ibid.*

kesepakatan pertukaran wilayah yang adil. Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa Palestina adalah “*partner for peace*” bagi Israel dan dengan yakin bahwa keduanya dapat mencapai kesepakatan historis. Namun fatalnya, ia membuka perundingan langsung secara defensif dengan menyatakan kembali dua prinsipnya kepada Palestina, yaitu konsep *legitimacy* dan *security* – adanya pengakuan dari Palestina terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan kesepakatan bahwa negara Palestina kelak merupakan negara yang aman bagi Israel. Netanyahu menegaskan bahwa dua prinsip tersebut merupakan “pilar perdamaian” dalam negosiasi damai dengan Palestina.⁵⁴

Pada perundingan putaran kedua di Sharm El-Sheikh, Mesir, 14-15 September 2010, Netanyahu belum juga memberikan keputusan mengenai isu signifikan seperti perbatasan, pemukiman, pengungsi Palestina dan status Yerusalem. Ketika mendapat peringatan dari Palestina maupun Amerika Serikat mengenai moratorium yang hampir berakhir, Netanyahu bergeming dan mempertahankan kepentingan koalisi sayap kanannya yang pro-pemukiman. Ia menegaskan bahwa masalah pemukiman tidak ada kaitannya dengan perundingan damai.

Pada intinya, Netanyahu mencoba untuk mengelak dari kewajibannya mewujudkan negara Palestina dalam situasi apapun. Ketika perundingan langsung belum memberikan hasil dan berada pada *current impasse* seperti perundingan yang

⁵⁴ “Binyamin Netanyahu Opens Middle East Talks with Two ‘Pillars to Peace’”, <http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/02/binyamin-netanyahu-opens-middle-east-talks>. Akses pada 6 Juni 2011.

sudah-sudah, Netanyahu kembali menyodorkan prasyarat agar ia bersedia memperpanjang masa moratorium sehingga perundingan damai dapat berjalan. Bahkan secara khusus Netanyahu menyampaikannya di hadapan *Knesset*, yaitu apabila Palestina secara tegas mengakui Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi, ia dan kabinetnya siap untuk memperpanjang moratorium. Hal tersebut dilakukan Netanyahu untuk menghindari situasi buntu perundingan langsung akibat usainya kebijakan moratorium. Netanyahu bersikeras bahwa permintaan tersebut bukan sebagai ‘prasyarat’ namun sebagai langkah meningkatkan kepercayaan (*confidence building measure*), terutama bagi rakyat Israel yang menurutnya kehilangan kepercayaan terhadap sikap Palestina akan perdamaian selama lebih dari 10 tahun. Ia juga menyatakan bahwa Israel siap memberikan konsesi, dan bahwa kesepakatan damai maupun negara Palestina merdeka akan tercapai jika rakyat Palestina berkenan memenuhi prasyarat tersebut.

*"The Palestinians wasted 10 months and now they demand to continue the [settlement] freeze. I hope their demand isn't a ploy to avoid the concessions that must be made in order to achieve a peace deal."*⁵⁵ Jelas Netanyahu menghalangi setiap prasyarat dari Palestina, karena hampir semua isu di meja perundingan telah diblokade olehnya. Namun pada kenyataannya, Netanyahu sendirilah yang

⁵⁵ "Netanyahu Offers Settlement Freeze in Return for Recognition as Jewish State, Palestinians Say No", <http://www.haaretz.com/news/national/netanyahu-offers-settlement-freeze-in-return-for-recognition-as-jewish-state-palestinians-say-no-1.318447>. Akses pada 14 Mei 2011.

mengutamakan prasyarat dan kepentingan koalisi sayap kanannya dalam negosiasi damai dengan Palestina.

2. Ketiadaan Komitmen dari Netanyahu

Kedatangan Benjamin Netanyahu ke arena politik sebagai perdana menteri Israel periode kedua melahirkan pandangan skeptikal bagi mereka yang pro-perdamaian, terutama bagi rakyat Palestina. Kegiatan pemukiman yang menjadi hambatan perundingan damai dari setiap pemerintahan di Israel, juga menjadi masalah di kabinet Netanyahu. Ia berencana untuk mengekspansi pemukiman Yahudi dengan dalih, *“I have no intention of building new settlements in the West Bank. But like all the governments there have been until now, I will have to meet the needs of natural growth in the population. I will not be able to choke the settlements”*.⁵⁶ Namun Netanyahu memiliki kewajiban untuk memulai upaya damai dengan Palestina dengan syarat kegiatan pemukiman Yahudi harus dihentikan. Desakan tersebut datang dari Amerika Serikat sebagai mediator, dan juga dari Palestina sebagai rival. Sebagai jawabannya Netanyahu bersedia menyepakati setiap kondisi maupun prasyarat dalam kesepakatan damai apabila Palestina bersedia memenuhi dua prinsip, seperti yang telah diuraikan pada subbab pertama di atas, yaitu pengakuan dan demiliterisasi. Prinsip tersebut merupakan pandangan Netanyahu mengenai haluan

⁵⁶ Barak Ravid. “Netanyahu: Likud-led Coalition Wouldn’t Build New Settlement”, <http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-likud-led-coalition-wouldn-t-build-new-settlements-1.268851>. Akses pada 13 Oktober 2010.

kebijakannya ke depan dalam menangani konflik dengan Palestina. Konsep pengakuan adalah keinginan Israel untuk diakui sebagai negara Yahudi. Dengan Palestina mengakui negara Israel, maka sebaliknya Israel juga bersedia mengakui berdirinya negara Palestina merdeka serta menjamin terciptanya perdamaian yang otentik. Lalu konsep demiliterisasi adalah bahwa negara Palestina kelak harus didemiliterisasi, dengan kata lain Israel berhak mengontrol pertahanan Palestina baik darat, laut maupun udara.

Tujuan perundingan langsung adalah menciptakan negara Israel dan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan rasa aman. Secara eksplisit Netanyahu mengakui eksistensi negara Palestina, tetapi dengan prasyarat yang mengikat karena ia, dalam argumennya, sadar jika Israel meninggalkan wilayah Palestina tanpa demiliterisasi, dapat dipastikan negara anti Israel seperti Iran, Lebanon dan sekutunya akan memulai perlawanan terhadap Israel. Namun, apabila Netanyahu bersikeras mempertahankan dua prinsipnya tersebut, perundingan damai tidak akan bisa mencapai titik temu.

Sebagai upaya *confidence building measure*, Netanyahu bersedia menghentikan aktivitas pemukiman Yahudi, yang hanya berlaku di kawasan Tepi Barat. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan apapun, terutama moratorium yang mempengaruhi aktivitas di Yerusalem, sebab Yerusalem adalah ibukota Israel, bukan pemukiman. Selama kebijakan pembekuan berlangsung sejak November 2009, Netanyahu tidak mendapat respon dari pihak Palestina. Palestina sendiri menyatakan

bahwa keputusan perdana menteri Israel tersebut belum cukup untuk membuat Palestina bersedia menuju meja perundingan. Pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menginginkan moratorium yang komprehensif dan permanen.

Sepertinya keinginan Palestina agar pembangunan di Yerusalem dihentikan tidak akan bisa terwujud di bawah kabinet Netanyahu. Netanyahu bergeming dan konsisten untuk tidak memberlakukan moratorium di Yerusalem. Fatalnya, bersamaan dengan diumumkannya moratorium, ia juga menyatakan bahwa pemerintahannya akan melanjutkan kembali kegiatan pemukiman sesaat setelah moratorium tersebut usai.

Satu demi satu prasyarat telah dimonopoli oleh Netanyahu, dengan tujuan inti, yakni tidak diimplementasikannya *two state solution* yang secara substansial menjadi basis negosiasi damai dengan Palestina. Sejak resmi dilantik menjadi perdana menteri Israel pada 31 Maret 2009, secara ambigu Netanyahu menginginkan proses damai dipercepat dan tanpa prasyarat, tetapi ia malah berkomitmen meneruskan pembangunan pemukiman yang menjadi hambatan terbesar untuk mengakhiri konflik dengan Palestina.

Pemerintahan Netanyahu merusak atmosfer moratorium dengan mengumumkan konstruksi pemukiman sebanyak 1.600 di Ramat Shlomo, Yerusalem Timur pada Maret 2010. Keputusan tersebut tidak hanya memperburuk hubungan Israel dengan Amerika Serikat, tetapi sekaligus meremehkan proses damai yang

sedang berlangsung. Terlebih lagi waktu pengumuman yang bersamaan dengan kepulangan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari Israel untuk membahas kelanjutan perundingan damai dengan Netanyahu. Setelah itu Amerika Serikat meminta Netanyahu untuk menghentikan konstruksinya di Yerusalem. Netanyahu menolak dan menegaskan bahwa kebijakan di Yerusalem tidak akan pernah berubah; Yerusalem adalah ibukota abadi Israel yang tidak terpisahkan; dan pemukiman akan terus berlanjut. Seperti yang pernah dikatakan oleh Ehud Olmert, *“to maximize the number of Jews; to minimize the number of Palestinians; not to withdraw to the 1967 border and not to divide Jerusalem”*.⁵⁷

Amerika Serikat juga meminta Netanyahu untuk menyepakati perundingan tidak langsung yang dimediasi oleh Utusan Khusus George Mitchell. Netanyahu menyambut perundingan yang disebut *indirect proximity talks* pada 9 Mei 2010. Netanyahu menyampaikan dua hal dalam perundingan tersebut yaitu: pertama, seperti yang telah ia jelaskan sebelumnya, bahwa perundingan harus berkembang dan tanpa prasyarat. Kedua, bahwa perundingan tidak langsung harus secepatnya menuju ke perundingan langsung. Menurut Netanyahu keputusan dan kesepakatan seperti keamanan dan kepentingan nasional masing-masing pihak hanya bisa diraih apabila Israel dan Palestina hadir untuk bernegosiasi.⁵⁸ Terlepas dari komitmennya yang

⁵⁷ David Landau. "Maximum Jews, Minimum Palestinians", <http://www.haaretz.com/general/maximum-jews-minimum-palestinians-1.105562>. Akses pada 20 Oktober 2010.

⁵⁸ "PM Netanyahu welcomes beginning of proximity talks," http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2010/PM_Netanyahu_beginning_proximity_talks_9-May-2010.htm. Akses pada 20 Maret 2011.

kontradiktif dengan negosiasi damai maupun kepentingan Palestina, Netanyahu menyerukan agar Palestina menanggapi kebijakan moratoriumnya dan segera berunding, *"I actually did this temporary freeze as an inducement to enter the talks, now seven months into this ten-month moratorium, the Palestinians have not yet come in, but they already argue that you have to extend that gesture. I think the right thing to do is just get into the talks; this is how we will resolve this issue of settlements"*.⁵⁹ Namun penyerangan pasukan militer Israel (*Israel Defense Force*) secara sepihak terhadap kapal bantuan Turki Mavi Marmara pada 31 Mei 2010, mengundang kontroversi dan otomatis merusak momen pasca *indirect proximity talks* dengan Palestina. Akibatnya Netanyahu semakin memperketat blokade di Jalur Gaza, yang telah eksis sejak 2007 tersebut. Keputusan yang menimbulkan polemik tersebut dilakukan sebagai bentuk 'perang ekonomi' terhadap Gaza untuk membatasi penyelundupan senjata/ kegiatan ekstremis yang mengancam keamanan Israel.

Pada Agustus 2010 Netanyahu menyepakati tenggat waktu satu tahun yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan. Pihak Palestina menginginkan perpanjangan moratorium dan penyerahan wilayah 1967 sebagai prasyarat memulai perundingan dengan Israel. Netanyahu menolak menambah jangka waktu moratorium karena ia juga memikul kepentingan koalisi sayap kanannya. Ia menegaskan apabila ia mengambil langkah paling signifikan,

⁵⁹ "PM Netanyahu Addresses the Council on Foreign Relations", http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2010/PM_Netanyahu_address_Council_Foreign_Relations_8-Jul-2010.htm?DisplayMode=print. Akses pada 2 Juni 2011.

maka koalisinya akan meninggalkannya. Saling klaim wilayah 1967 juga menjadi masalah utama bagi Israel dan Palestina. Tetapi Netanyahu sepertinya tetap ingin mempertahankan wilayah tersebut , “*previous Israeli governments did not agree to return to 1967 lines and my government certainly would not agree to do so*”.⁶⁰

Selain itu Netanyahu berkomitmen untuk mempertahankan setidaknya 50% wilayah Tepi Barat dan tidak menyerahkan Yordan kepada bangsa Arab Palestina. Tepi Barat yang saat ini berada di bawah administrasi PLO tetap dikuasai oleh Israel, kecuali Jalur Gaza yang diambil secara kudeta oleh Hamas. Sekalipun dengan komitmen yang mengarah pada kepentingan sepihak, Netanyahu tetap berkewajiban memenuhi perundingan langsung (*direct negotiation*) yang telah ia sepakati.

Pada perundingan langsung yang dimulai 2 September 2010 di Washington D.C., Netanyahu berulang kali mengatakan bahwa Palestina adalah *partner for peace* baginya dan kesungguhannya untuk mencapai kesepakatan historis, “*together we can lead our people to a historic future that can put an end to claims and to conflict. This will not be easy. A true peace, a lasting peace, will be achieved only with mutual and painful concessions from both sides ... from my side and from your side*”. Netanyahu kembali menegaskan formula perdamaian yang telah ia sampaikan di Bar Ilan, bahwa *mutual recognition* adalah kondisi yang paling tepat untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, “*Just as you expect us to be ready to recognize a Palestinian*

⁶⁰ Amy Teibel. “No Meetings Between Israelis, Palestinians Planned”, http://seattletimes.nwsources.com/html/nationworld/2009928107_apusmideastus.html. Akses pada 28 Februari 2011.

*state as the nation state of the Palestinian people we expect you to be prepared to recognize Israel as the nation state of the Jewish people”.*⁶¹

Selain itu kesepakatan damai juga harus berdasarkan pada keamanan. Netanyahu mengacu pada kekuatan baru yang sedang berkembang di kawasan, seperti Iran dan sekutunya serta peningkatan aktivitas misil (serangan Hamas dari Gaza). Netanyahu meminta Mahmoud Abbas untuk memenuhi prinsipnya tersebut, *“I’m fully aware and I respect your people’s (Palestinian) desire for sovereignty. I’m convinced that it’s possible to reconcile that desire with Israel’s security.”* Namun setelah perundingan langsung berjalan, Netanyahu masih jauh dari komitmennya untuk memperpanjang masa moratorium yang kebetulan berakhir bersamaan dengan proses perundingan langsung.

Netanyahu mengakhiri perundingan putaran pertama dengan menyetujui pertemuan setiap dua minggu yang dimulai pada 14 September 2010 di Sharm El-Sheikh, Mesir. Pada pertemuan kedua tersebut Netanyahu dan Abbas membahas masalah-masalah krusial, seperti klaim wilayah 1967 yang disepakati dengan pertukaran tanah (*land swap*), kepulangan para pengungsi Palestina yang terdiaspora dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat maupun di Yerusalem, serta implementasi dari *two state solution* yaitu mendirikan negara Palestina merdeka.

⁶¹ “Binyamin Netanyahu Opens Middle East Talks with Two ‘Pillars to Peace’”, *loc. cit.*

Perspektif dan komitmen saling berkaitan, di mana perspektif dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap perundingan damai, menjadi latar belakang yang mendasari kebijakan/keputusan yang ia ambil. Sejauh ini, perspektifnya tersebut tidak mencerminkan komitmennya untuk merealisasikan kesepakatan dari negosiasi damai, bahkan menutup semua peluang/konsesi secara sepihak. Akibatnya, perundingan langsung (damai) menjadi terbengkalai dan ironisnya Netanyahu terus melanjutkan pembangunan pemukiman yang notabene menjadi hambatan terbesar gagalnya perundingan damai.

Dari pemaparan di atas maka dapat dirangkum perspektif dan komitmen Netanyahu yang secara faktual menghambat tercapainya kesepakatan dalam proses damai, antara lain:

1. Masalah keamanan sebagai kunci atas kebijakan Netanyahu terhadap usaha-usaha teror secara frontal maupun *clandestine* yang mengancam Israel, yang aplikasinya dengan konsep demiliterisasi bagi negara Palestina.
2. Pengakuan Palestina terhadap Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.
3. Tidak ada penarikan pasukan dari wilayah yang diokupasi Israel dari batas 1967, Tepi Barat maupun Dataran Tinggi Golan.
4. Upaya Israel mengimplementasikan *economic peace* di Tepi Barat sebagai proses (substitusi) menuju *political peace*.
5. Israel tidak bertanggung jawab atas pengungsi Palestina yang terdiaspora.

6. Ekspansi pemukiman untuk memnuhi '*natural growth*'.
7. Tidak ada negosiasi dengan prasyarat.
8. Yerusalem sebagai ibukota Israel yang tidak dapat dibagi dan tidak ada kebijakan yang dapat menghalangi aktivitas (pemukiman) di Yerusalem.

B. Persepsi dan Komitmen Palestina tentang Perundingan

Dalam subbab ini akan dibahas persepsi dan komitmen dari pihak Palestina terhadap perundingan damai dengan rivalnya, Israel. Sebagai pihak yang terlibat konflik, Palestina juga memiliki pandangan dan sikap agar proses damai dapat terus berlangsung. Hal ini karena dari sudut pandang konflik, Palestina merupakan korban dari penjajahan Israel. Oleh karena itu untuk memperjuangkan haknya yang telah dirampas, Palestina berupaya untuk berpartisipasi dalam setiap perundingan damai yang difasilitasi oleh para mediator seperti Amerika Serikat dan *The Quartet*, agar penyebab konflik dalam konteks ini seperti sengketa wilayah yang merupakan unsur kepentingan pihak bertikai dapat dinegosiasikan dan dicari jalan keluar yang tepat.

Mahmoud Abbas yang memerintah sebagai Presiden Otoritas Palestina sejak Januari 2005 telah mengalami berbagai proses perundingan damai dengan Israel, dan sebagai fokus tulisan maka perundingan langsung (*direct negotiation*) dalam periode kedua Benjamin Netanyahu yang akan dikaji lebih lanjut.

1. Persepsi Palestina tentang Perundingan

Telah berpuluh tahun konflik antara Israel dan Palestina berlangsung namun hingga kini belum ada penyelesaian untuk mengakhiri konflik yang telah mengakar tersebut. Palestina merupakan korban akibat penjajahan Israel yang berbasis Zionisme. Karena penjajahan tersebut Palestina kehilangan wilayah, kedaulatan, bahkan rakyatnya, demi berdirinya negara Israel. Mahmoud Abbas sebagai wakil dari rakyat Palestina berupaya untuk memperjuangkan hak bangsanya. Oleh karena itu dengan ikut serta dalam setiap perundingan maka setidaknya Palestina dapat menegosiasikan apa yang menjadi haknya.

Sebagai wakil Palestina yang dikenal moderat di kalangan masyarakat internasional, Abbas memilih untuk merundingkan setiap masalah tanpa harus bertindak represif. Hal tersebut mendatangkan kecaman dari seterunya, Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Akan tetapi nasib bangsa Palestina harus ditentukan dan segera dituntaskan tanpa penundaan. Sejak peristiwa *Cast Lead Operation* di Gaza pada Januari 2008, Abbas membekukan setiap proses damai dengan Israel. Masalah tidak hanya sampai disitu; terpilihnya Benjamin Netanyahu dari partai sayap kanan semakin mempersulit upaya damai. Dengan beruntunnya peristiwa tersebut tidak heran jika Mahmoud Abbas menginginkan untuk merundingkan masalah-masalah signifikan yang menjadi akar penyebab konflik, seperti pemukiman Yahudi, pengungsi Palestina, batas wilayah serta status Yerusalem.

Perundingan langsung (*direct negotiation*) bersama Netanyahu merupakan cara bagi Abbas untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak rakyatnya tersebut. Sebelum Netanyahu resmi terpilih, Abbas memberi ultimatum bahwa siapapun yang menjalankan pemerintahan Israel, tetap dihadapkan pada kewajiban untuk melanjutkan perundingan damai dan bersiap atas tekanan dari masyarakat internasional. Pasca Netanyahu terpilih, di samping mendapat kritikan dan kecaman dari rakyat Arab-Palestina, Abbas menunjukkan sikap defensifnya dengan menyatakan bahwa ia tidak akan berunding apabila pemerintahan Israel tidak memperlihatkan komitmennya untuk menghidupkan proses damai, baik dari masalah pemukiman Yahudi maupun usulan solusi dua negara.

Bagi Abbas, penghentian aktivitas pemukiman Yahudi merupakan satu-satunya cara menuju kesepakatan damai, setelah itu baru diikuti dengan isu signifikan lainnya. Ia tidak menggubris upaya Netanyahu dalam meningkatkan ekonomi di Tepi Barat, dan berdalih bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena investasi yang ditanamkan oleh Otoritas Palestina melalui Perdana Menteri Salam Fayyad, jauh sebelum Netanyahu menjabat. Menurutnya Israel harus lebih dulu fokus pada isu politik daripada isu ekonomi.

Menurut persepsi Abbas terhadap perundingan damai, baik Palestina maupun Israel harus melanjutkan perundingan yang telah mencapai kesepakatan dan bukan melangkah mundur untuk membahas masalah yang tidak signifikan. Berkenaan dengan hal tersebut, Abbas menawarkan prasyarat bahwa negosiasi damai dengan

Netanyahu dimulai berdasarkan atas kesepakatan-kesepakatan yang telah diraih dalam perjanjian Annapolis tahun 2007. Sebagai tambahan, dalam perjanjian Annapolis baik Abbas maupun mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert telah mencapai kesepakatan, seperti penyerahan 93,5%-97% Tepi Barat kepada Palestina; pembagian wilayah Yerusalem; diperbolehkannya 10.000 pengungsi Palestina kembali wilayahnya.⁶²

Pada Sidang Komite PLO di Ramallah, Mahmoud Abbas menyatakan bahwa ia akan memperbaharui perundingan damai setelah Israel membekukan seluruh aktivitas pemukiman dan mengakui perbatasan 1967 sebagai perbatasan bagi negara Palestina. Akibat krisis politik yang dialami oleh Palestina, Abbas bahkan sempat memutuskan untuk mengakhiri kepemimpinannya pada Januari 2010. Selain itu, Abbas juga kecewa dengan kebijakan moratorium Netanyahu yang parsial dan temporer. Ia menginginkan moratorium total, termasuk Yerusalem, karena baginya tidak mungkin untuk berunding sementara Israel melanggar komitmen perundingan itu sendiri.⁶³

Berpartisipasi dalam negosiasi damai berarti berhadapan dengan kepentingan rival, dalam konteks ini ialah Israel. Di satu sisi Abbas berpartisipasi dalam menghidupkan proses damai, namun di sisi lain Netanyahu memiliki kepentingan

⁶² "Abbas to Quartet: Israel Must Commit for Talks to Resume", <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3699737,00.html>. Akses pada 18 Juli 2011.

⁶³ Ali Waked. "Abbas Names 1967 Borders As Precondition for Talks", <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3820218,00.html>. Akses pada 16 Maret 2011.

yang berseberangan baik dengan kepentingan Abbas maupun kepentingan perundingan damai itu sendiri. Pada intinya Israel belum memiliki komitmen menyelesaikan konflik secara lebih mengakar dan mencari kesepakatan dengan Palestina. Kepentingan Israel seperti konsep demiliterisasi dan pengakuan negara Yahudi merupakan ganjalan bagi Palestina untuk memperoleh haknya dan hambatan terhadap perundingan damai. Negosiator Palestina Saeb Erekat meminta Netanyahu untuk mematuhi substansi perundingan damai dengan menghentikan aktivitas pemukiman, termasuk *natural growth* dan segera mengakhiri penjajahannya.

Palestina bersikeras tidak mengakui Israel sebagai negara Yahudi karena akan berdampak pada tiga hal berikut antara lain:

1. Dengan mengakui Israel sebagai negara Yahudi akan mengingkari dan memarjinalisasikan keberadaan minoritas non-Yahudi di Israel, khususnya rakyat Palestina yang berjumlah 20% dari populasi di Israel.
2. Dengan mengakui eksistensi negara Yahudi maka akan memperbesar posisi Israel untuk menolak kepulangan para pengungsi Palestina ke tanah asal mereka yang diokupasi sejak sejak 1948.
3. Dengan mengakui Israel sebagai negara Yahudi akan memupus sistem demokrasi yang mengutamakan persamaan dan hak bagi para

penduduknya, selain itu juga akan melahirkan konsep negara Israel yang rasis.⁶⁴

Palestina juga menolak demiliterisasi dengan alasan bahwa mereka memiliki hak untuk *self-defense*. Dalam sebuah interview, Abbas menyatakan prinsipnya secara harafiah untuk tidak mengakui Israel sekalipun berbenturan dengan perundingan damai, *“we recognized the State of Israel within 1967 borders...it is a fact that the majority of the citizens of the State of Israel are Jews. But he cannot force me to agree with this definition. It isn't my power to define Israel's character”*. Abbas juga menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki keinginan kuat untuk berdamai, tetapi hanya dengan jika Israel menghentikan konstruksi pemukiman secara total dan mengakui batas wilayah 1967.⁶⁵

Namun Mahmoud Abbas harus tetap berpartisipasi dalam perundingan langsung 2 September 2010. Ia bersedia hadir setelah Amerika Serikat menjanjikan akan mendesak Israel untuk membekukan pemukiman secara komprehensif. Abbas juga meperingatkan Israel untuk memperpanjang moratorium demi kelangsungan perundingan, namun tidak ada tindakan dari Israel. Ia memberi opsi pada Israel untuk memilih perdamaian atau pemukiman. Israel memilih pemukiman dan menghancurkan proses damai dengan mengakhiri moratorium pada 27 September

⁶⁴ Ghassan Khatib. “A Palestinian View: Netanyahu Is Throwing Obstacles In The Way of Peace”, <http://imeu.net/news/printer0016392.shtml>. Akses pada 17 Mei 2011.

⁶⁵ “Interview with PA President Mahmoud Abbas: ‘I Will Not Back Down’”, <http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,676374,00.html>. Akses pada 16 Maret 2011.

2010. Bagi Abbas peristiwa tersebut merupakan pelanggaran Israel secara sepihak terhadap perundingan damai yang telah disepakati. Sebagai reaksinya, Abbas meninggalkan perundingan dan vakum sampai Israel memperpanjang pembekuan pemukiman.

Petinggi Otoritas Palestina mengecam tindakan Israel yang telah merusak proses damai dengan melanjutkan kembali pembangunan pemukiman. Sekalipun Abbas didera dengan berbagai prasyarat dari Israel namun ia masih memiliki harapan untuk melanjutkan negosiasi damai. Ia sempat pesimis dan skeptis mengenai nasib perundingan dengan tampilnya sosok garis keras, Netanyahu, *“the Netanyahu government is a real problem and there is no common ground for negotiations with it. Construction in the settlement is continuing, Netanyahu is declaring Jerusalem and Palestinian refugees topics not up for negotiations, so what is there to talk about?”*⁶⁶

Palestina mempertahankan persepsi dan prinsip mengenai prasyarat Netanyahu untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi agar moratorium berlanjut, *“all settlement is illegitimate, it must be frozen for a return to negotiation. The issue of the Jewishness of the state has nothing to do with the matter”*. Abbas menekankan Palestina tetap memperjuangkan hak atas wilayah 1967, status Yerusalem sebagai ibukota masa depan Palestina dan *right of return* bagi pengungsi Palestina. Apabila

⁶⁶ The AP & Avi Isacharoff. “ Hamas: Netanyahu Emerged Triumphant from Summit with Obama, Abbas”, <http://www.haaretz.com/news/hamas-netanyahu-emerged-triumphant-from-summit-with-obama-abbas-1.7315>. Akses pada 14 Mei 2011

Israel bersedia memperpanjang moratorium, Palestina pun bersedia kembali berpartisipasi dalam pendekatan dialogis. Namun apabila Israel tetap mempertahankan ekspansi pemukiman di tengah-tengah upaya damai, maka Palestina akan mengambil tindakan unilateral. Tindakan ini akan dibahas di bab selanjutnya dan termasuk dalam konteks dampak akibat macetnya kembali perundingan langsung.

2. Keinginan Palestina terhadap Perundingan Damai

Pasca Benjamin Netanyahu terpilih sebagai perdana menteri dan Barack Obama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat, Mahmoud Abbas dihadapkan dengan upaya perdamaian yang diwakili oleh Utusan Khusus Amerika George Mitchell. Abbas berkomitmen untuk mendukung gagasan *two state solution*, yaitu solusi untuk mengakhiri konflik dengan membentuk negara Israel dan negara Palestina yang hidup berdampingan secara aman dan damai. Tapi di sisi lain, krisis politik antara PLO dan Hamas menjadi hambatan bagi Abbas untuk menunjukkan sosok yang *powerful* di hadapan rivalnya, Israel. Hamas menolak mengakui eksistensi Israel dan berusaha untuk menghancurkannya, sedangkan hakikat *two state solution* adalah adanya *mutual recognition* dalam konteks geografis (wilayah). Dengan sikap oposisi Hamas terhadap perundingan damai dan keberadaan Israel, maka akan menyulitkan PLO mencapai kesepakatan. Sedangkan Israel menolak untuk berunding dengan Hamas.

Oleh karena itu sebelum perundingan damai dimulai, Abbas berkomitmen untuk tidak bernegosiasi dengan Israel, apabila Israel tidak menghentikan pembangunan pemukiman dan tidak mengakui batas wilayah 1967 sebagai batas negara Palestina. Ia menekankan bahwa permintaan tersebut bukanlah prasyarat, namun sebagai kewajiban dari Israel sendiri untuk merealisasikannya. Setelah moratorium dilakukan oleh Israel, Abbas menolak mengakui moratorium tersebut. Terlebih Israel terus melanjutkan pembangunan pemukiman di Yerusalem. Abbas menginginkan pembekuan pemukiman yang komprehensif, tidak terkecuali di Yerusalem.⁶⁷

Bagi rakyat Palestina, dengan berlangsungnya pemukiman Yahudi maka akan menutup harapan untuk mewujudkan negara Palestina merdeka. Abbas berkomitmen untuk mencari pengakuan dari masyarakat internasional atas wilayah 1967 sebagai wilayah Palestina apabila Israel tidak dapat menunjukkan komitmennya untuk menghentikan pemukiman secara total. Namun, Abbas bersedia berpartisipasi dalam *indirect proximity talks* pada 9 Mei 2010 yang dimediasi oleh George Mitchell. Dalam perundingan tersebut Abbas meminta untuk saling menyepakati isu-isu signifikan, terutama terkait dengan status Yerusalem. Ia memberikan jangka waktu penyelesaian isu tersebut hingga perundingan langsung (*direct negotiation*) dimulai pada September 2010. Pihaknya juga berkomitmen apabila pada perundingan

⁶⁷ Avi Issacharoff. "Abbas: Partial Halt On Settlement Activity Is Not A Freeze", <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1116693.html>. Akses pada 28 Februari 2011.

langsung Israel tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pemerintah Otoritas Palestina dan Liga Arab akan beralih ke Dewan Keamanan PBB untuk meminta pengakuan atas batas wilayah 4 Juni 1967 sebagai batas dari negara Palestina.⁶⁸

Akan tetapi setelah perundingan langsung dimulai, tidak ada perkembangan yang signifikan menyangkut pertimbangan Palestina tersebut. Israel lebih berfokus pada ekstremis Palestina yang merusak atmosfer perundingan dengan melakukan serangan sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap upaya damai dengan Israel. Abbas menyikapinya dengan memerintah aparat Palestina untuk menangkap pihak-pihak yang mencoba merusak proses perundingan. Bersamaan dengan berakhirnya moratorium, Abbas meminta Netanyahu untuk memperpanjang pembekuan pemukiman agar perundingan damai dapat terus berjalan dan kesepakatan dapat diraih. Netanyahu menolak permintaan Abbas tersebut dan melanjutkan pemukiman.

Abbas mengecam untuk meninggalkan perundingan dan bersedia melakukan negosiasi apabila Israel menunjukkan komitmennya. *"I cannot say I will leave the negotiations, but it's very difficult for me to resume talks if Prime Minister Binyamin Netanyahu declares that he will continue his activity in the West Bank and Jerusalem"*. Pada pidatonya di Majelis Umum PBB Abbas menegaskan bahwa Israel harus memilih antara perdamaian atau tetap melanjutkan kegiatan pemukiman. Ia bersedia untuk menegosiasikan kesepakatan final apabila Netanyahu bersedia

⁶⁸ "Abbas: No Direct Peace Talks Before Progress Made in Proximity Talks", <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/abbas-no-direct-peace-talks-before-progress-made-in-proximity-talks-1.301149>. Akses pada 18 Juli 2011.

memperpanjang moratorium selama tiga atau empat bulan. Selain itu, Abbas berkomitmen untuk meraih kesepakatan yang adil dalam isu perbatasan, keamanan, status Yerusalem serta isu pemukiman apabila Israel menghentikan seluruh kegiatan pemukimannya. Abbas juga berjanji kepada rakyatnya untuk mengakhiri penjajahan Israel dan segera mendirikan negara Palestina merdeka.⁶⁹

Setelah mendapat dukungan dari Liga Arab, Abbas dan Liga Arab memberi ultimatum kepada Amerika Serikat untuk meminta Israel memperpanjang moratorium. Pada akhirnya, Netanyahu bersedia menawarkan ekstensi moratorium dengan syarat apabila Palestina secara eksplisit mengakui Israel sebagai negara rakyat Yahudi, setelah itu ia siap meminta persetujuan dari kabinet sayap kanannya dan kembali melanjutkan perundingan.

Namun Abbas tidak bersedia mengakui negara Israel, *“from our perspective, there is the state of Israel and we will not recognize it as a Jewish state. Raising this issue is aimed at denying Israel's Arab citizens their rights and at making them illegal citizens, as well as at blocking any chance of the Palestinian refugees returning to their homes inside Israel”*. Abbas menegaskan pengakuan terhadap Israel tidak ada kaitannya dengan perundingan damai. Upaya-upaya Israel yang terkesan sabotase proses perundingan damai, malah akan semakin meningkatkan komitmen Palestina untuk mencari solusi penyelesaian konflik secara unilateral, yaitu dengan upaya

⁶⁹ Hilary Leila Krieger. “Abbas Could Stay in Talks Even If Settlement Freeze Ends”, <http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=188927&R=R3>. Akses pada 21 Maret 2011.

rekonsiliasi dengan Hamas maupun pencarian dukungan dari masyarakat internasional untuk mengakui negara Palestina dengan wilayah 1967.⁷⁰

Mengacu pada pembahasan di atas mengenai persepsi dan komitmen Palestina terhadap proses perundingan damai, sehingga dapat dirangkum sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi yang mendasari upaya Palestina untuk mencapai kesepakatan dengan Israel. Antara lain:

1. Pembekuan pemukiman Yahudi sebagai salah satu tahap untuk memulai perundingan damai.
2. Batas wilayah 1967 sebagai kompromi untuk mendirikan negara Palestina.
3. Kesepakatan yang diraih dalam Annapolis 2007 sebagai acuan dalam perundingan langsung.
4. Mempertahankan *right of return* para pengungsi Palestina yang terdiaspora di berbagai wilayah akibat okupasi Israel.
5. Status Yerusalem sebagai ibukota masa depan Palestina.
6. Menolak konsep demiliterisasi dari Israel yang melanggar kedaulatan negara Palestina nantinya.
7. Menolak mengakui Israel sebagai negara rakyat Yahudi dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi.

⁷⁰ "The Bibi Report", <http://bibireport.blogspot.com/2010/10/israeli-willingness-for-concessions-to.html>. Akses pada 21 Oktober 2010.

BAB IV

STAGNASI KONDISI KONFLIK AKIBAT TERHAMBATNYA

PEMULIHAN DAMAI

Perbedaan persepsi dalam mengakomodasi kepentingan antara pemerintahan Israel dan Palestina telah menjadi hambatan setiap proses perundingan damai. Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, baik di pihak Israel maupun Palestina memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, sehingga konflik yang ada menjadi konflik yang berlarut-larut dan semakin mendalam. Tetapi menurut pendapat John Burton, konflik Israel dan Palestina juga tidak selalu menyangkut kepentingan, namun juga tentang kebutuhan dan nilai-nilai yang telah berakar dalam. Negosiasi maupun mediasi yang konservatif/tradisional yang hanya mengatasi kepentingan di permukaan tidaklah cukup untuk menyelesaikan atau mengubah konflik.⁷¹

Ketidakseimbangan antar elit pemerintahan berkonflik juga menjadi pemicu situasi konflik yang statis namun skalanya meningkat. Setelah Benjamin Netanyahu berhasil menjabat sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya, Mahmoud Abbas menunjukkan sikap antipati, terutama terhadap proses damai. Tetapi Netanyahu dengan leluasa memperluas pemukiman serta memberikan syarat-syarat kepada Palestina agar Israel bersedia berunding. Kurang tegasnya mediator, yaitu Amerika

⁷¹ John Burton. *Conflict: Resolution and Prevention*, op. cit. hlm. 26

Serikat dalam menengahi kepentingan serta kebutuhan Israel dan Palestina, secara netral dan objektif, sehingga konflik tersebut semakin berlarut-larut. Barack Obama sendiri kerepotan merealisasikan janjinya untuk mendukung Palestina mendapatkan wilayah 1967 dari Israel, selain itu ia juga gagal membujuk Israel untuk memperpanjang moratorium. Perundingan damai antara Benjamin Netanyahu dan Mahmoud Abbas mengalami jalan buntu seperti perundingan-perundingan sebelumnya yang berlangsung nihil. Situasi ini didominasi sikap Israel yang tidak menunjukkan komitmen untuk berdamai dengan Palestina. Apabila Israel berniat berdamai dengan Palestina maka seharusnya Netanyahu tidak memberikan prasyarat yang memberatkan pihak Palestina serta berusaha meluruskan perspektifnya dengan Palestina, begitu juga sebaliknya. Namun yang terjadi adalah kontraproduktif dari kedua belah pihak yang mengakibatkan macetnya perundingan langsung sehingga muncul reaksi baik dari pihak Israel maupun Palestina.

Di bab ini akan dibahas situasi konflik antara Israel dan Palestina yang mengalami stagnasi khususnya sejak Benjamin Netanyahu menjadi perdana menteri Israel periode kedua. Situasi ini terjadi akibat kebijakan dari pemerintahan Benjamin Netanyahu serta persepsi antara Israel dan Palestina yang saling berseberangan dan saling tarik ulur sehingga secara tidak langsung membentuk pola *vicious circle*, yang apabila antara Netanyahu maupun Abbas tidak mampu menegosiasikan kepentingannya masing-masing, maka eskalasi konflik ke tingkat politik maupun kekerasan tidak dapat terelakkan.

A. Pengaruh Kebijakan Netanyahu terhadap Stagnasi Perundingan Damai

Sebagaimana seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa faktor elit Israel memegang peranan penting bagi terciptanya perdamaian dengan Palestina. Namun kebijakan elit Israel didominasi oleh unsur ideologis, yaitu paham Zionisme yang bertujuan untuk menciptakan Negara Yahudi di “tanah yang telah dijanjikan”. Partai Likud sebagai perpanjangan tangan dari implementasi paham Zionisme semakin diminati oleh masyarakat Israel, terutama dari masyarakat garis keras atau pro-pemukiman. Terlebih, sewaktu kampanye pemilihan umum 2008-2009, kandidat calon perdana menteri dari Likud, yaitu Benjamin Netanyahu, mengusung tema ‘keamanan’ bagi rakyat Israel yang traumatis pasca peristiwa Operasi *Cast Lead*. Selain itu, janji-janji Netanyahu mengenai perdamaian dengan seteru abadi Israel, yaitu Palestina, semakin mendapat nilai tambah dari masyarakat Israel. Sekalipun kalah tipis dari kompetitornya, Kadima, di pemilihan umum legislatif Israel pada Februari 2009, namun Netanyahu berhasil melobi partai-partai yang mayoritas sayap kanan sehingga pada Maret 2009, ia kembali dilantik sebagai perdana menteri Israel untuk yang kedua kalinya.

Naiknya Netanyahu menjadi perdana menteri Israel, membuat Amerika Serikat langsung mengambil langkah antisipasi. Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Barack Obama menjadikan konflik Israel dan Palestina sebagai agenda utama dari tugas pemerintahannya yang harus diselesaikan. Selain itu Obama juga menunjuk

mantan Senator George Mitchell sebagai Utusan Khusus Perdamaian di Timur Tengah. Pemerintahan Barack Obama mendukung perundingan dengan konsep *two state solution* dan meminta Israel untuk menghentikan aktivitas pemukiman sebagai langkah awal dimulainya upaya damai.⁷²

Tindakan Amerika Serikat tersebut segera direspon oleh Benjamin Netanyahu dalam pidatonya yang kontroversial di Universitas Bar Ilan pada 14 Juni 2009. Dalam pidatonya tersebut, Netanyahu mengemukakan haluan kebijakannya terutama yang menyangkut dengan masa depan hubungan dengan Palestina. Secara tersirat Netanyahu mendukung konsep dua negara yaitu negara Israel dan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan damai, namun ternyata ia membatasi kedaulatan negara Palestina tersebut.

Ada dua prinsip utama yang ditegaskan oleh Netanyahu sebagai dasar kebijakannya ke depan, yaitu:

1. Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
2. Demiliterisasi negara Palestina dari aspek militer, baik darat maupun udara.

Netanyahu menyatakan apabila Palestina yang secara definitif ingin diakui oleh Israel, maka Israel juga sebaliknya, ingin eksistensinya sebagai negara Yahudi diakui oleh Palestina. Netanyahu juga menjelaskan, setelah negara Palestina berdiri,

⁷² Shai Feldman & Khalil Shikaki. "The Obama Presidency and the Palestinian-Israeli Conflict", <http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB39.pdf> Akses pada 3 Januari 2011.

maka keberadaannya harus tidak mengancam keamanan Israel, sehingga Palestina harus bersedia didemiliterisasi. Hal tersebut menghindari adanya infiltrasi dari pihak-pihak ekstremis yang anti-Israel seperti Iran.

Sebelumnya, pada Mei 2009, Netanyahu melakukan pendekatan di bidang ekonomi untuk meningkatkan arus perekonomian di Tepi Barat. Upaya Netanyahu tersebut membuahkan hasil di mana tingkat ekonomi di Tepi Barat dinyatakan oleh IMF naik sekitar 7%. Perdana Menteri Israel tersebut menyatakan bahwa langkah 'ekonomi perdamaian' merupakan tahapan menuju perundingan politik. Namun tindakan Netanyahu tersebut ditangkap secara bias oleh para petinggi Palestina dan mengkhawatirkan perundingan politik tidak akan pernah terealisasi, kecuali Israel melepaskan penjajahannya di Palestina. Di sisi lain, peningkatan ekonomi di Tepi Barat juga menaikkan citra Fatah yang menguasai kawasan tersebut, yang identik dengan citra korupsi, menjadi lebih baik.⁷³

Benjamin Netanyahu berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat maupun Yerusalem. Isu pemukiman yang menjadi agenda utama Barack Obama tersebut ternyata tidak sejalan dengan visi Netanyahu. Semenjak dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, Barack Obama melakukan pendekatan berbeda terhadap hubungannya dengan Israel. Seperti yang dikutip dalam pidatonya di Kairo, 4 Juni 2009, bahwa Amerika Serikat tidak mengakui upaya Israel

⁷³ Ethan Bronner. "Signs of Hope Emerge in the West Bank", <http://www.nytimes.com/2009/07/17/world/middleeast/17westbank.html>. Akses pada 2 November 2010.

menyangkut pembangunan pemukiman Yahudi. Ia menegaskan aktivitas pemukiman Yahudi telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (contohnya, *Road Map* 2003) dan meminta Israel untuk menghentikannya.⁷⁴

Namun Netanyahu menyanggah bahwa pemerintahannya tidak akan mengambil alih lahan tambahan untuk membangun pemukiman baru, tetapi ekspansi pemukiman akan tetap dilakukan terkait dengan pertumbuhan alami (*natural growth*). Terminologi *natural growth* menjadi alasan bagi Netanyahu untuk tetap meneruskan pembangunan pemukiman yang secara jelas menjadi isu utama dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Menurutnya, setiap keluarga Yahudi yang bermukim dan berkembang populasinya di Tepi Barat maupun Yerusalem, membutuhkan akomodasi seperti tempat tinggal, institusi pendidikan dan pelayanan sosial.⁷⁵

Netanyahu tetap mengabaikan seruan dari Amerika Serikat untuk membekukan aktivitas pemukiman. Perdana menteri garis keras tersebut malah menghimbau agar perundingan damai segera dilaksanakan dan difokuskan tanpa dicampur-adukkan dengan isu-isu seperti pemukiman. Selain itu bagi Netanyahu,

⁷⁴ "Barack Obama's June 4, 2009 Speech in Cairo, Egypt".
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09/. Akses pada 06 Februari 2011.

⁷⁵ Jeff Glor. "Benjamin Netanyahu Interview: Full Text",
<http://www.cbsnews.com/stories/2009/06/15/eveningnews/main5090328.shtml> Akses pada 21 April 2011.

status Yerusalem tetap diklaim sebagai ibukota Israel yang tidak dapat dibagi dan Israel tidak dapat berkompromi dengan status kepulauan para pengungsi Palestina.⁷⁶

Netanyahu tidak bersedia menghentikan pembangunan pemukiman, namun hanya menyetujui untuk memperlambat pembangunan konstruksi dalam waktu singkat. Ia menyatakan bahwa Israel akan memproses tender yang telah disetujui sebelumnya serta tidak akan membatasi konstruksi di Yerusalem Timur.⁷⁷

Saat *Triple Summit* digelar di New York pada 22 September 2009 antara Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Benjamin Netanyahu dan Mahmoud Abbas, Obama menyatakan bahwa pemukiman Yahudi adalah kegiatan yang ilegal dan menegaskan kepada Israel untuk menghentika setiap aktivitas pemukiman. Setelah pertemuan tersebut dan atas desakan Amerika Serikat, Netanyahu pada akhirnya bersedia membekukan setiap aktivitas pemukiman, terkecuali di Yerusalem Timur.

Kebijakan pembekuan/moratorium pemukiman tersebut menimbulkan pro-kontra. Para petinggi Palestina tidak mengakuinya karena moratorium tersebut bersifat parsial dan tidak permanen. Selain itu para koalisi sayap kanan Netanyahu dan para menteri garis keras yang menentang diberlakukannya pembekuan tersebut. Bersamaan dengan diumumkannya moratorium tersebut pada 25 November 2009, Netanyahu juga menyatakan bahwa tepat setelah pembekuan berakhir, Israel akan

⁷⁶ "The American Task Force on Palestine", <http://www.americantaskforce.org>. Akses pada 28 Februari 2011.

⁷⁷ *Ibid.*

terus melanjutkan konstruksi dan agar pihak Palestina juga segera mengambil respon positif. Amerika Serikat menyambut tindakan Israel tersebut dengan baik.

Netanyahu menetapkan jangka waktu 10 bulan moratorium terhitung dari November 2009 setelah diumumkan sampai dengan September 2010. Namun ditengah-tengah pembekuan masih berlangsung, pada Maret 2010 Israel merusak situasi yang hampir kondusif dengan mengumumkan konstruksi di Ramat Shlomo sebanyak 1.600 unit rumah. Terlebih hal tersebut bertepatan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari Israel dan membahas masalah perundingan damai tidak langsung (*indirect negotiation*) bersama Netanyahu.

Selain menyesalkan waktu pengumuman yang tidak tepat di Ramat Shlomo, sebaliknya, Netanyahu juga mengelak setiap kecaman yang datang dari masyarakat internasional akibat peristiwa tersebut, *“our policy on Jerusalem is the same policy followed by all Israeli governments for the 42 years, and it has not changed. As far as we are concerned, building in Jerusalem is the same as building in Tel Aviv”*.⁷⁸

Berdasarkan data dari Organisasi Perdamaian *Peace Now*, ada beberapa kegiatan pembangunan maupun konstruksi pemukiman selama moratorium secara resmi masih berlangsung. Kegiatan pemukiman di bawah ofisial Netanyahu tersebut sangat jelas melanggar hakikat moratorium. Data tersebut dilansir setelah moratorium

⁷⁸ Wikipedia. “Benjamin Netanyahu”, http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu. Akses pada 13 Oktober 2010.

berjalan selama 8 bulan, yaitu pada Agustus 2010. Penemuan utama dari kegiatan pemukiman ilegal tersebut mencakup:

1. Sekitar 600 unit rumah telah dimulai untuk dibangun selama moratorium, di lebih dari 60 daerah pemukiman.
2. Sekitar 492 dari jumlah unit rumah tersebut melanggar secara langsung ketentuan dari moratorium.
3. Selama rata-rata per tahun (ketika tidak ada moratorium) kira-kira 1.130 unit rumah dimulai dibangun dalam 8 bulan di pemukiman. Pembangunan yang baru dimulai selama moratorium yang kira-kira mencakup setengah dari langkah pembangunan normal di pemukiman.
4. Beberapa dari 2.000 unit rumah telah dalam konstruksi, sebagian dari jumlah unit tersebut telah dimulai sebelum moratorium diumumkan pada November 2009.⁷⁹

Hal tersebut berarti bahwa ada atau tidak adanya moratorium, kegiatan pembangunan pemukiman tetap terus berjalan. Selain itu, di bawah akan ada tabel mengenai data konstruksi pemukiman dengan pelanggaran dalam skala besar.

⁷⁹ Peace Now. "Eight Months into the Settlement Freeze", <http://peacenow.org.il/eng/node/99> Akses pada 28 Maret 2011.

TABEL 1

DATA PEMUKIMAN DENGAN PELANGGARAN DALAM SKALA BESAR

No.	Pemukiman	Jumlah Unit Baru	Jumlah Unit Rumah (perkiraan)
1.	Modiin Ilit*	19	180
2.	Givat Zeev*	14	40
3.	Mitzpeh Yericho	4	24
4.	Ari'el	6	22
5.	Maale Adumim	6	21
6.	Kfar Etzion	12	20
7.	Kfar Edumim	18	18
8.	Itamar**	12	12
9.	Eli	11	11
10.	Oranit	8	9
11.	Tzofin	9	9
12.	Beitar Ilit*	4	7
13.	Elkanah	6	6
14.	Faduel	3	6
15.	El'azar	1	5
16.	Yakir	5	5

Sumber: Peace Now Reports August 2010,
<http://80.70.129.201/site/en/peace.asp?pi=61&docid=4747&pos=1>. Akses pada 28 Maret 2011.

Ket. *pada pemukiman tersebut, pemerintah Israel mengecualikannya saat moratorium. Di Modiin Ilit misalnya 84 unit telah disetujui; di Givat Zeev, 76 unit telah disetujui, tetapi hanya 26 unit yang mulai dibangun dari unit yang telah disetujui tersebut; di Maale Adumim, 89 unit telah disetujui; di Beitar Ilit, 112 unit disetujui setelah moratorium dimulai.

**Di pemukiman Itamar, fondasi telah diletakkan setelah moratorium dimulai tetapi pembangunannya belum dimulai.

Lebih dari beberapa dekade terakhir, rata-rata 1.700 rumah baru dibangun tiap tahunnya di daerah pemukiman (menurut data dari Biro Pusat Statistik, itu tidak termasuk konstruksi ilegal). Dalam 8 bulan, ini berarti rata-rata dari 1.133 unit baru akan telah dibangun. *Peace Now* memperkirakan bahwa 603 unit baru yang telah dibangun menunjukkan penurunan yang signifikan dari jumlah unit yang sedang dibangun; hampir setengahnya dari total per tahun. Bagaimanapun juga menurut kesepakatan dari moratorium, seharusnya tidak ada aktivitas pembangunan pemukiman baru apapun.

Menjelang perundingan langsung, pemerintahan Netanyahu malah melakukan aktivitas pembangunan pemukiman yang menyalahi aturan moratorium. Sebagai tambahan, Israel juga menyetujui pembangunan 40 unit tempat tinggal bagi pemukim di kawasan Pizgat Zeev, Yerusalem Timur. Pada Juli 2010, Israel malah telah

menyetujui 32 unit lainnya. Keputusan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan 210 unit tempat tinggal bagi pemukim Yahudi.⁸⁰

Selama proses perundingan langsung, Netanyahu telah diperingati oleh para mediator dan Palestina untuk memperpanjang masa moratorium yang berakhir pada 26 September 2010. Dengan diberikannya perpanjangan waktu, maka pembicaraan damai dapat terus berjalan. Akan tetapi Netanyahu menolak untuk mengambil resiko, sebab hal tersebut dapat memicu friksi baik dari para koalisi maupun dari para pemukim. Kepala Dewan Regional Shomron Gershon Mesika bahkan menegaskan, *“an announcement of a continuation of the building freeze will be considered an announcement of the end of term for the Netanyahu government”*.⁸¹

Pada 27 September 2010, tanpa mengindahkan instruksi Netanyahu, para pemukim yang dipimpin oleh MK Likud Danny Danon merayakan berakhirnya moratorium dengan peletakan batu pertama di sekolah di daerah Revava, Tepi Barat. Berakhirnya pembekuan pemukiman menjadi hambatan bagi kelangsungan perundingan damai dan fatalnya, Netanyahu tidak memiliki komitmen untuk memperpanjang masa pembekuan. Sebelumnya, anggota MK Likud Benny Begin menegaskan bahwa saat moratorium usai, pemukiman akan berlanjut lebih cepat dan

⁸⁰ “Jelang Perundingan Langsung, Israel Setujui Pemukiman Baru”, <http://www.hidayatullah.com/read/12819/04/08/2010/hidayatullah.com> Akses pada 25 September 2010.

⁸¹ Chaim Levinson. “Peace Now: 2,066 West Bank Settlement Homes to be Built as soon as Freeze Ends”, <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/peace-now-2-066-west-bank-settlement-homes-to-be-built-as-soon-as-freeze-ends-1.313429>. Akses pada 19 Juli 2011.

lebih banyak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 13.000 unit rumah yang telah disetujui izin pembangunannya sebelum moratorium diadakan. Dari 13.000 unit tersebut, 2.066 unit akan siap dibangun, dan di bawah adalah data unit yang tersebar di berbagai wilayah di mana konstruksi akan dilaksanakan:

TABEL 2

DATA RENCANA KONSTRUKSI DI TEPI BARAT

No.	Nama Wilayah	Jumlah Unit Rumah
1.	Ari'el	136
2.	Talmon	70
3.	Vered Yericho	41
4.	Shilo	22
5.	Kochav Ha'shachar	24
6.	Kiryat Arba	24
7.	Barkan	62
8.	Givat Ze'ev	300
9.	Modi'in Illit	260
10.	Mevo Horon	70
11.	El'azar	58
12.	Nili	46
13.	Zufin	50
14.	Tapuach	18

Sumber: Peace Now Reports September 2010, <http://peacenow.org.il/eng/node/332>. Akses pada 28 Maret 2011.

Dari tabel di atas, dapat dianalisa bahwa dari 13.000 unit dipecah menjadi 2.066 unit rumah yang akan dibangun di wilayah-wilayah pemukiman di Tepi Barat tersebut dan termasuk dalam daftar ‘percepatan pembangunan’ segera setelah moratorium berakhir. Data di atas merupakan data unit bangunan yang jumlahnya digeneralisasi karena tidak setiap pihak berwenang dari masing-masing wilayah mempublikasikan jumlah unit rumah yang akan dibangun. Namun secara teknis jumlah unit rumah tersebut telah mendapat pengesahan dari pemerintah Israel. Sebagai contoh, izin konstruksi di Ari’el sebanyak 136 unit telah disetujui, tetapi belum ada pengerjaan bangunan di lapangan. Hal ini dikarenakan jumlah unit rumah yang direncanakan untuk dibangun dapat bersifat fleksibel, yaitu dapat dikurangi atau dibatalkan atau dapat ditambah/diekspansi.

Sedangkan 11.000 unit rumah yang tersisa berpotensi untuk dibangun tanpa perlu persetujuan lebih lanjut lagi dari pemerintah Israel, seperti laporan dari *Peace Now*,

“there are at least another 11,000 housing units approved for construction according to valid building plans, and the settlers can build them even without further government approval. This means that if the government decides on a de facto “tacit freeze,” and commits not to approve new construction but without renewing the freeze order -- the settlers can still build 13,000 housing units, 5,000 of which are in isolated settlements east of the separation barrier”.⁸²

Laporan tersebut semakin mengesahkan kebijakan ekspansi Netanyahu, di mana ia menolak untuk membangun pemukiman baru namun memperluasnya untuk

⁸² *Ibid.*

memenuhi *natural growth*. Pada sidang *Knesset Winter Season*, Netanyahu menyatakan bahwa ia dan koalisinya siap untuk memperbaharui moratorium apabila pihak Palestina mengakui secara tegas negara Israel sebagai tanah rakyat Yahudi. Bahkan ia menambahkan bahwa penolakan Palestina terhadap negara Israel merupakan penyebab konflik selama ini dan apabila tidak dipenuhi maka konflik tidak akan berakhir. Namun secara kontradiktif, Netanyahu menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, tanpa prasyarat apapun.⁸³

Akan tetapi komitmen Netanyahu berseberangan dengan upaya menghidupkan perdamaian di mana pemerintahan Netanyahu kembali mengumumkan rencana pembangunan di wilayah aneksasi Yerusalem Timur. Pengumuman kontroversial tersebut menimbulkan kecaman keras khususnya dari Amerika Serikat terhadap Israel karena merusak telah proses damai dengan mengumumkan pembangunan di area sensitif seperti Yerusalem Timur. Rumah yang akan dibangun berjumlah sekitar 1.300 unit di dua wilayah Har Homa dan Ramot, Yerusalem.⁸⁴ Netanyahu berdalih mengelak kecaman Amerika Serikat bahwa Yerusalem bukanlah pemukiman, tetapi Yerusalem merupakan ibukota dari negara Israel.

⁸³ "Netanyahu Offers Settlement Freeze in Return for Recognition as Jewish State, Palestinians Say No", <http://www.haaretz.com/news/national/netanyahu-offers-settlement-freeze-in-return-for-recognition-as-jewish-state-palestinians-say-no-1.318447>. Akses pada 12 Oktober 2010.

⁸⁴ Isabel Kershner. "Israel Plans 1,000 Housing Units in East Jerusalem", <http://www.nytimes.com/2010/11/09/world/middleeast/09mideast.html>. Akses pada 6 Juni 2011.

Pasca moratorium, konstruksi di wilayah pemukiman semakin diintensifkan. Pekerjaan pembangunan dimulai dengan membangun 1.712 unit rumah baru di pemukiman Tepi Barat (tidak termasuk Yerusalem Timur). Konstruksi tersebut berlangsung di 67 kawasan pemukiman berbeda. Juga terdapat sejumlah besar konstruksi ilegal, termasuk pada pos-pos dan lingkungan sekitar yang konstruksi belum disetujui, dari sekitar 250 unit bangunan ilegal.⁸⁵

Menurut data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik, di sepanjang tahun 2009, pekerjaan dimulai dengan 1.920 unit bangunan. Dengan konstruksi yang dilanjutkan dalam jumlah yang sama tanpa moratorium, 1.600 unit baru akan telah dibangun selama 10 bulan moratorium. Dalam tiga bulan sejak berakhirnya moratorium para pemukim berupaya untuk menutup celah tersebut dan mulai membangun dalam jumlah yang sama (1.712).⁸⁶

Laporan dari BPS juga menunjukkan bahwa dari Januari sampai September (2010), konstruksi sebanyak 50 unit rumah dimulai dan 1.175 lainnya telah selesai. Jadi, jumlah unit di bawah konstruksi pada akhir September adalah 1.651. Ketika 1.712 unit tambahan yang didata oleh *Peace Now* ditambahkan ke jumlah tersebut, maka total dari unit rumah masih dalam tahap konstruksi sebanyak 3.363.⁸⁷

Di bawah terdapat tabel dimana konstruksi berlangsung di kawasan tersebut, yaitu konstruksi yang dimulai sejak berakhirnya moratorium.

⁸⁵ Peace Now Reports December 2010. *Loc. cit.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

TABEL 3

DATA KONSTRUKSI PASCA MORATORIUM DI TEPI BARAT

No.	Nama Wilayah	Jumlah Unit Rumah
1.	Karmeit Tzur	42
2.	Elazar	58
3.	Ma'ale Michmash	11
4.	Neriya	30
5.	Susiya	15
6.	Ateret	18
7.	Kedumim	76
8.	Pe'duel	24
9.	Revava	60
10.	Reihan	24
11.	Shaked	25

Sumber: Peace Now Reports December 2010,
<http://www.peacenow.org.il/eng/content/intensive-construction-every-other-settlement>.
Akses pada 28 Maret 2011.

B. Situasi Konflik antara Israel dan Palestina Akibat Tidak Adanya Persamaan Persepsi dan Komitmen.

Terpilihnya Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel menimbulkan skeptisme bagi rakyat Palestina terhadap perundingan damai. Mahmoud Abbas menyatakan bahwa pemerintahan *incumbent* Netanyahu tidak mempercayai perdamaian. Netanyahu menolak menyetujui gagasan solusi dua negara, sedangkan Abbas bersedia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Abbas menginginkan Israel agar memenuhi komitmennya untuk menghentikan aktivitas pemukiman sebagai awal memulai perundingan damai. Alih-alih menyetujui, Netanyahu malah mengutarakan persepsinya mengenai perundingan damai di Bar Ilan dan membatasi setiap prasyarat dari Palestina. Ia menegaskan untuk tetap mempertahankan ekspansi pemukiman yang berlanjut sejak 1967 dan tidak akan menyerahkan wilayah okupasi 1967. Lalu secara eksplisit ia mengakui negara Palestina namun dengan mengontrol kedaulatannya melalui apa yang ia sebut sebagai prinsip perdamaian, yaitu demiliterisasi negara Palestina dan pengakuan dari Palestina terhadap negara Israel.

Palestina tersudut dan mengecam Netanyahu telah menutup pintu menuju perdamaian dan secara sistematis mengambil seluruh prasyarat dari meja perundingan. Abbas menolak prinsip Netanyahu tersebut dan mempertahankan manuver politiknya dengan meminta Israel menghentikan pemukiman Yahudi. Oleh

karena itu perundingan damai tidak dapat dimulai lebih awal akibat ketiadaan komitmen dari Netanyahu dan sikap defensif Mahmoud Abbas.

Selama moratorium pun Israel tetap melangsungkan konstruksi pemukiman di Yerusalem. Tindakan ini semakin memanaskan hubungan Israel dengan Palestina dan Amerika Serikat. Abbas sempat mengancam untuk tidak akan berunding, namun Amerika Serikat mendesaknya untuk berpartisipasi di tahap awal negosiasi damai, yaitu pada *indirect proximity talks*. Abbas menyatakan bahwa isu seperti batas wilayah bagi negara Palestina di masa depan dan status Yerusalem harus didiskusikan dan diberi tenggat waktu hingga perundingan langsung September 2010. Apabila Israel belum bisa memenuhi kewajiban tersebut maka Palestina akan melakukan tindakan unilateral dan mencari pengakuan dari komunitas internasional.

Adanya pemukiman Yahudi telah melanggar hukum internasional dan hukum humaniter. Akibat Israel terus membangun pemukiman menyebabkan rakyat Palestina kehilangan setiap haknya, seperti:

1. Hak atas kepemilikan properti, akibat kontrol Israel atas proyek intensif di Tepi Barat untuk pemukiman;
2. Hak untuk mendapat persamaan dan perlindungan hak, di mana Israel menerapkan sistem legal yang terpisah sesuai dengan latar belakang nasionalnya, yaitu para pemukim Yahudi mendapatkan perlakuan sesuai dengan sistem legal Israel yang berdasarkan hak asasi manusia dan nilai-

nilai demokratis, sementara rakyat Palestina mendapatkan perlakuan sesuai dengan sistem legal militer yang secara sistematis mencabut hak mereka;

3. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang cukup. Sejak dimulainya pembangunan pemukiman Yahudi, Israel bertujuan mencegah pertumbuhan masyarakat Palestina, dan kontrol Israel atas sumber air untuk mencegah Palestina mengembangkan agrikulturnya;
4. Hak untuk kebebasan bergerak. Dengan adanya pos-pos penjagaan Israel dan sarana yang menghalangi pergerakan Palestina di Tepi Barat, di mana kegiatan tersebut dilakukan untuk melindungi pemukiman dan aktivitas lalu lintas para pemukim;
5. Hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan mengambil alih teritori Palestina dan menciptakan berbagai area pemukiman Israel, sehingga dapat menutup keinginan Palestina untuk mendirikan negara Palestina yang independen dan nyata.⁸⁸

Menuju tahapan perundingan damai, Abbas mengingatkan Netanyahu untuk memperpanjang waktu moratorium sehingga cukup untuk meraih kesepakatan. Tetapi Netanyahu menolak karena itu akan membahayakan koalisi sayap kanannya. Ia menyalahkan pihak Palestina yang telah menyia-nyiakan upayanya untuk

⁸⁸ Eyal Hareuveni. "Israeli Settlement Policy in the West Bank: B'tselem", http://www.btselem.org/Download/201007_By_Hook_and_by_Crook_Eng.pdf. Akses pada 21 Oktober 2010.

membangun perdamaian melalui moratorium. Netanyahu menegaskan bahwa perundingan harus dimulai tanpa prasyarat apapun, namun Abbas mengklaim permintaannya tersebut bukanlah prasyarat tetapi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Israel.

‘Perang dingin’ antara Abbas dan Netanyahu akan menjadi berlarut-larut apabila Amerika Serikat tidak berusaha keras menjembatani keduanya agar segera memulai perundingan damai. Sejak awal, Netanyahu dan Abbas terbentur dengan kepentingan dan persepsi masing-masing pihak sehingga sangat sulit untuk menyatukan keduanya untuk berunding secara langsung. Abbas terlebih dulu merasa skeptis untuk mencapai perdamaian dengan pemerintahan Netanyahu dan sebagai sikap defensif ia menyodorkan prasyarat bahwa Israel harus membekukan pemukiman agar perundingan langsung dapat dimulai. Sementara Netanyahu langsung memblokir permintaan Abbas tersebut dengan mengajukan prinsip demiliterisasi dan pengakuan terhadap Israel.

Isu pemukiman menjadi salah satu ganjalan tidak terselesaikannya konflik antara Israel dan Palestina. Bagi Palestina pemukiman Yahudi dapat menghalangi terbentuknya negara Palestina, dan komitmen Israel saat ini patut dipertanyakan. Netanyahu mengklaim bahwa ia menginginkan negosiasi, namun tindakannya sejauh ini, menunjukkan ia tidak memiliki komitmen untuk mewujudkan negara Palestina.

Situasi konflik setelah kegagalan mencapai kesepakatan dan akibat berakhirnya moratorium, menjadi konflik adu kepentingan antara Israel dan Palestina dengan bertindak secara sepihak. Israel tetap melanjutkan pembangunan pemukiman, sementara Palestina mencari dukungan untuk segera mewujudkan negara Palestina melalui pengakuan dari masyarakat internasional serta adanya penguatan internal politik Palestina. Pihak Israel mengecam tindakan tersebut dan menegaskan bahwa upaya unilateral apapun harus melalui negosiasi, tetapi di sisi lain Palestina bersikeras bahwa negosiasi dapat dicapai kembali apabila Israel melakukan moratorium secara komprehensif dan permanen. Dengan benturan kepentingan dan keinginan masing-masing pihak sehingga perundingan damai apapun akan menemui jalan buntu, dengan kata lain, apabila pihak mediator tidak segera dapat menjembatani perbedaan atau tidak adanya komitmen yang cukup kuat dari kedua belah pihak.

C. Tersendat-sendatnya Perundingan Damai

Konsep perundingan damai, di masa Netanyahu saat ini, disebut juga perundingan langsung (*direct negotiation*), mengandung substansi mengenai eksistensi negara Israel dan negara Palestina dalam satu wilayah dan hidup secara berdampingan dengan jaminan keamanan (*two state solution*). Namun akibat perbedaan persepsi baik dari Netanyahu maupun Abbas dalam menyikapi proses

damai, sehingga substansi perundingan tersebut jauh dari realitas. Netanyahu secara eksplisit menolak gagasan dua negara, sementara Abbas mendukung konsep tersebut.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina telah menjadi agenda luar negeri Amerika Serikat. Terlebih dengan adanya komitmen dari Barack Obama dengan mendukung *two state solution* dan tidak mengakui pemukiman Yahudi. Obama juga mendukung negara Palestina yang akan berdiri di wilayah 1967. Netanyahu dengan tegas menolak menghentikan pemukiman dengan alasan kabinetnya tidak membangun pemukiman baru tetapi meneruskan tender yang telah disetujui sebelumnya. Sementara itu Abbas tidak akan berunding apabila Israel tidak memutuskan kebijakannya mengenai pemukiman dan batas wilayah 1967.

Pada *Triple Summit* September 2009 yang difasilitasi oleh Barack Obama, Netanyahu dan Abbas bertemu untuk membicarakan masalah perundingan damai. Namun sikap Obama menyatakan retorika yaitu ia mendukung negara Palestina di batas wilayah 1967, tetapi di saat yang bersamaan Obama juga mendukung prinsip Netanyahu untuk memulai perundingan tanpa prasyarat. Setelah pertemuan tersebut, proses perundingan masih belum menemukan titik terang. Abbas mempertahankan moratorium agar perundingan damai dapat dimulai, sedangkan Netanyahu berpegangan pada prinsipnya di Bar Ilan agar moratorium dapat dilaksanakan.

Pada November 2009 Obama berhasil membujuk Netanyahu untuk mengeluarkan kebijakan moratorium sehingga perundingan damai dapat berlangsung.

Moratorium dilaksanakan namun perundingan masih tersendat-sendat dengan sikap Abbas yang menolak mengakui moratorium tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak mungkin melangsungkan perundingan sementara Israel terus membangun, terlebih di Yerusalem.

Amerika Serikat kembali memediasi keduanya melalui *indirect proximity talks*, di mana Utusan Khusus untuk Perdamaian George Mitchell melakukan *shuttle diplomacy* antara Netanyahu dan Abbas sehingga didapat kesepakatan mengenai perundingan selanjutnya. Akan tetapi insiden penyerangan IDF terhadap kapal bantuan milik Turki, Mavi Marmara pada Mei 2010, memperkeruh upaya damai yang baru saja dibangun.

Netanyahu terus menyerukan kepada Palestina untuk segera memulai perundingan dan tidak menunda-nunda waktu. Retorika ini sangat jelas, di satu sisi masa moratorium yang singkat, di sisi lain Netanyahu tidak mungkin memperpanjang moratorium karena pertimbangan sayap kanan dan para pemukim Yahudi yang ekstremis. Pada Agustus 2010, Amerika Serikat mengumumkan tanggal perundingan langsung yang telah disepakati. Netanyahu maupun Abbas setuju dengan tenggat waktu satu tahun untuk mencapai kesepakatan.

Perundingan langsung yang dimulai dengan dua putaran yaitu pada 2 September 2010 dan 14-15 September 2010 membahas berbagai isu signifikan seperti masalah batas wilayah, pengungsi Palestina, status Yerusalem dan pemukiman

Yahudi. Namun belum sampai mencapai kesepakatan, keduanya terbentur dengan masalah pemukiman Yahudi yang dilanjutkan setelah moratorium berakhir pada 27 September 2010. Abbas memutuskan untuk vakum dari perundingan apabila Netanyahu tidak berniat memperpanjang moratorium. Netanyahu bersedia memperpanjang moratorium apabila Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Setelah mencapai proses yang cukup lama untuk sampai ke tahap perundingan Israel *vis a vis* Palestina, karena sangat sulit untuk meluruskan persepsi kedua belah pihak dan juga untuk tidak mendahulukan kepentingan, namun pada akhirnya perundingan tersebut kembali menemukan jalan buntu dikarenakan kurangnya komitmen untuk meraih perdamaian, terutama dari pihak Israel. Akibatnya, kegagalan perundingan langsung tersebut membawa dampak signifikan, baik bagi Israel yang terus melenggang untuk melanjutkan ekspansi pemukiman, dan khususnya bagi Palestina, dengan bertindak secara unilateral.

D. Dampak Situasi Konflik terhadap Palestina

Akibat tersendat-sendatnya perundingan langsung dengan Israel, Mahmoud Abbas mencari solusi namun tetap bersedia melanjutkan perundingan apabila Israel menghentikan aktivitas pembangunan pemukimannya. Salah satunya adalah dengan melakukan diplomasi terhadap komunitas internasional, antara lain PBB dan negara-

negara di Amerika Latin serta Asia untuk mengakui negara Palestina berdasarkan batas wilayah 1967.

Dengan mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional, maka secara perlahan-lahan Palestina berupaya untuk mengakhiri penjajahan Israel. Upaya diplomasi tersebut telah direncanakan oleh Palestina, dan sebagai strategi alternatif apabila perundingan damai menemui jalan buntu. Palestina mencari dukungan antara lain melalui Dewan Keamanan PBB melalui sidang PBB pada September 2011. Dalam sidang tersebut, Palestina meminta untuk dapat berpartisipasi dan mengumumkan negara Palestina.

Pada awal tahun 2011, beberapa bulan setelah perundingan langsung mandek dan setelah Abbas memutuskan untuk melakukan diplomasi ke berbagai negara, sudah ada lima negara Amerika Latin yang memberikan pengakuannya, antara lain Chile yang telah lama mengakui negara Palestina dan memiliki kantor perwakilan di Tepi Barat, kemudian diikuti oleh Brazil, Argentina, Bolivia dan Ekuador. Sejak saat itu, telah 130 negara yang mengakui negara Palestina. Petinggi Palestina merencanakan untuk mendapat pengakuan sekitar 150 negara pada September 2011.⁸⁹

Menurut Abbas dengan upayanya tersebut, Palestina dapat memiliki legitimasi dan kedaulatan sebagai negara serta sebagai implementasi dari *Arab-Peace Initiative* 2002 yang menjadi basis perundingan langsung dengan Israel. Selain itu

⁸⁹ "Over 130 Countries Recognize Palestine as A State", <http://www.wariscrime.com/2011/01/04/news/over-130-countries-recognize-palestine-as-a-state/>. Akses pada 24 Juli 2011.

dengan dukungan diplomatik dari sebagian negara-negara di Amerika Latin tersebut, sehingga dapat membuat Amerika Serikat maupun Israel memperbaharui perundingan langsung yang gagal pada September 2010 lalu.

BAB V

KESIMPULAN

Kelanjutan hubungan Israel dan Palestina bergantung pada pemerintahan Israel, terlebih mengenai masa depan perdamaian kedua seteru abadi tersebut. Tetapi dengan kembalinya Benjamin Netanyahu ke arena politik sebagai perdana menteri Israel untuk yang kedua kalinya, menjauhkan harapan akan adanya perdamaian yang hakiki. Netanyahu memiliki orientasi politik garis keras yang melanggengkan tujuan dari Zionisme, yaitu gerakan politik Israel yang bertujuan untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina (“tanah yang telah dijanjikan”). Koalisi Netanyahu yang didominasi dari partai sayap kanan ditambah dengan suara mayoritas para pemukim yang ekstremis membuat situasi menuju perdamaian menjadi pesimistis. Hal tersebut disebabkan karena satu tujuan yang sama tersebut, yaitu menciptakan *Greater Israel*, dengan okupasi yang lebih modern, yaitu pembangunan pemukiman.

Saat sang mediator antara Israel dan Palestina, yaitu Amerika Serikat berkomitmen terhadap penghentian pemukiman Yahudi, justru Netanyahu semakin gencar bermanuver bahwa ia tetap melanjutkan kebijakan pembangunan pemukiman. Ditambah dengan alasan adanya *natural growth* sehingga Netanyahu sepertinya lebih cenderung mengutamakan kepentingan para pemukim ketimbang upaya dan seruan perdamaian dari negara adikuasa seperti Amerika Serikat.

Namun ketika keadaan semakin klimaks, sebab di sisi lain Amerika Serikat harus merealisasikan janji yang ia uraikan dalam pidato di Kairo, yaitu meminta Israel untuk menghentikan kegiatan pemukiman, mau tidak mau Netanyahu mengalah dan pada akhirnya mengeluarkan moratorium terhadap kegiatan pemukiman. Akan tetapi, tindakan Netanyahu tersebut dapat dianalisa sebagai upaya *confidence building measures*. Jelas saja, karena moratorium tersebut menimbulkan kontroversi, yaitu: 1) bersifat parsial, hanya mencakup kawasan Tepi Barat dan bukan di Yerusalem Timur; 2) bersifat temporer dan tidak permanen; 3) tidak konsisten, seperti yang dibahas di bab empat, bahwa selama moratorium pemerintahan Israel tetap membangun pemukiman sekenanya.

Hal tersebutlah yang membuat, khususnya, Palestina kecewa dengan pemerintahan Israel. Mahmoud Abbas menyatakan bahwa ia tidak akan bersedia mencapai kesepakatan dengan Israel apabila negara Yahudi tersebut belum menunjukkan komitmen penuh terhadap upaya perdamaian. Namun, di pihak Netanyahu, Palestina terlebih dahulu harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi serta berkomitmen untuk menangani kekerasan yang sering dilakukan oleh para ekstremis Palestina.

Perbedaan persepsi dan komitmen antara Israel dan Palestina menjadi pemicu langgengnya konflik antara keduanya. Sekalipun didukung oleh mediator-mediator hebat seperti Amerika Serikat dan *The Quartet*, tidak akan ada artinya apabila Israel maupun Palestina belum mampu menjembatani kebutuhan dasar masing-masing

pihak. Dan pada akhirnya akibat *chaos* dan perbedaan komitmen, terlebih dari pemerintahan Netanyahu, sehingga berdampak pada macetnya kembali perundingan damai yang telah diupayakan dengan susah payah. Kondisi yang sangat klise, mengingat situasi yang serupa juga pernah dialami oleh Netanyahu ketika ia menjabat pertama kali sebagai perdana menteri Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, John. *Conflict: Human Needs Theory*. New York: St. Martin's Press, 1990.
- Burton, John. *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: St. Martin's Press, 1990.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1988.
- Lockman, Zachary and Joel Beinin. *Intifada, the Palestinian Uprising Against Israeli Occupation*. New York : I.B Tauris Publishers London, 1989.
- Kuncahyono, Trias. *Jalur Gaza: Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : PT. Pustaka LP3S, 1990.
- Miall, Hugh, et.all. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rudy, Teuku May. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : PT.Eresco, 1993.
- Sprinzak, Ehud. *The Ascendance of Israel's Radical Right*. New York : Oxford University Press. Inc.,1991.

Jurnal :

- Sihbudi, Riza. "Mengurai Benang Kusut Timur Tengah". *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.49-59, 1993.

Majalah :

McGirk, Tim, "The Old Bibi or A New One", *TIME*, Vol. 173 No.19/2009.

Prabandari, Purwani D. "Serangan Kilat Netanyahu". *TEMPO* No. 4013 Edisi 30 Mei-5 Juni 2011.

"Tel Aviv: Netanyahu's Change of Heart", *TIME*, Vol. 173 No. 25/26 /2009.

"Verbatim", *TIME Magazine*, Vol. 176 No. 21 Edisi 22 November 2010.

Online Book :

Mayer, Bernard. *The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide*. San Fransisco: Jossey Bass, 2000. <http://www.transnational-perspectives.org/transnational/articles/article9.pdf> Akses pada 12 Februari 2011.

Online Journal :

Beinin, Joel & Lisa Hajjar. "Palestine, Israel and the Arab-Israeli Conflict: A Primer", http://www.merip.org/palestine-israel_primer/Palestine-Israel_Primer_MERIP.pdf. Akses pada 8 Maret 2011.

Kelman, Herbert C. "Conflict Resolution and Reconciliation: A Social Psychological Perspective", http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/forocomplutense/conf_hkelman_220210.pdf. akses pada 1 Juni 2011.

Orenstein, Alexis. "If You Build It, They Will Come: The Controversy Over Settlement Expansion", <http://www.hillel.upenn.edu/kedma/04/alexis.pdf>. Akses pada 27 Mei 2011.

Sandole, Dennis J.D. "John Burton's Contribution to Conflict Resolution, Theory and Practice: A Personal View", http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol6_1/Sandole.htm. Akses pada 4 Februari 2011.

Schenker, Hillel. "Peace Prospects after the Israeli Elections", <http://www.pij.org/details.php?id=1214>. Akses pada 16 Desember 2010.

Siegman, Henry. "Imposing Middle East Peace", <http://www.usmep.us/usmep/wp-content/uploads/2010-01-20-NOREF-Imposing-Middle-East-Peace-by-Henry-Siegman1.pdf>. Akses pada 11 Maret 2011.

Zanotti, Jim. "Israel and the Palestinians: Prospect for a Two-State Solution", <http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R40092.pdf>. Akses pada 6 Februari 2011.

Website :

"13,000 Housing Units Can Be Built Without Further Government Approval", <http://peacenow.org.il/eng/node/332>. Akses pada 28 Maret 2011.

Ali Waked. "Abbas Names 1967 Borders As Precondition for Talks", <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3820218,00.html>. Akses pada 16 Maret 2011.

Aluf Benn. "Why Isn't Netanyahu Backing Two-State Solution", <http://www.haaretz.com/print-edition/news/analysis-why-isn-t-netanyahu-backing-two-state-solution-1.271126>. Akses pada 16 Desember 2010.

Ami Isseroff. "Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's Policy Address", http://www.mideastweb.org/netanyahu_june_14_speech.htm. Akses pada 16 Desember 2010.

-----, "Modern Israel and the Israel-Palestinian Conflict (Arab-Israeli Conflict) – A Brief History", <http://www.mideastweb.org/briefhistory-oslo.htm>. Akses pada 21 Maret 2011.

Amy Teibel. "No Meetings Between Israelis, Palestinians Planned", http://seattletimes.nwsources.com/html/nationworld/2009928107_apusmideastus.html. Akses pada 28 Februari 2011.

“Arab Pesimistic About Israeli Elections”, <http://www.voanews.com/english/news/a-13-2009-02-11-voa45-68796607.html>. Akses pada 8 Mei 2011.

Avi Issacharoff. “Abbas: Partial Halt On Settlement Activity Is Not A Freeze”, <http://www.haaretz.com/hasen/spages/1116693.html>. Akses pada 28 Februari 2011.

“Barack Obama’s June 4, 2009 Speech in Cairo, Egypt”, http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09/. Akses pada 06 Februari 2011.

Barak Ravid. “Israel to Reject Call for Establishment of Palestinian State by 2011”, <http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-reject-quartet-call-for-establishment-of-palestinian-state-by-2011-1.308238>. Akses pada 26 April 2011.

Barak Ravid. “Netanyahu: Likud-led Coalition Wouldn’t Build New Settlement”, <http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-likud-led-coalition-wouldn-t-build-new-settlements-1.268851>. Akses pada 13 Oktober 2010.

Chaim Levinson. “Peace Now: 2,066 West Bank Settlement Homes to be Built as soon as Freeze Ends”, <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/peace-now-2-066-west-bank-settlement-homes-to-be-built-as-soon-as-freeze-ends-1.313429>. Akses pada 19 Juli 2011

Dan Diker. “Israel’s Return To Security Based-Diplomacy”, <http://www.jcpa.org/text/security/diker.pdf>. Akses pada 14 Maret 2011.

David Landau. ”Maximum Jews, Minimum Palestinians”, <http://www.haaretz.com/general/maximum-jews-minimum-palestinians-1.105562>. Akses pada 20 Oktober 2010.

“Did Bibi Blow It?”, <http://www.mideastweb.org/log/archives/00000786.htm>. Akses pada 21 Maret 2011.

“Direct Negotiation Between Israel and the Palestinians in 2010”,
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_negotiations_between_Israel_and_the_Palestinians_in_2010. Akses pada 11 Januari 2011.

Editorial Staff. “One Month Deadline for Settlement Freeze”,
<http://www.mees.com/en/articles/60-political-coment-18-october-2010>. Akses pada 18 Maret 2011.

Ethan Bronner. “Signs of Hope Emerge in the West Bank”,
<http://www.nytimes.com/2009/07/17/world/middleeast/17westbank.html>. Akses pada 2 November 2010.

Eyal Hareuveni. “Israeli Settlement Policy in the West Bank: B’tselem”,
http://www.btselem.org/Download/201007_By_Hook_and_by_Crook_Eng.pdf. Akses pada 21 Oktober 2010.

“Excerpts from PM Netanyahu’s Speech at the Knesset Special Session”,
<http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2009/PM-Netanyahu-addresses-%20Knesset-Special-Session-23-Dec-2009>. Akses pada 10 Oktober 2010.

Ghassan Khatib. “A Palestinian View: Netanyahu Is Throwing Obstacles In The Way of Peace”, <http://imeu.net/news/printer0016392.shtml>. Akses pada 17 Mei 2011.

Haaretz Service. “Palestinian Official: PA Will Never Recognize Israel as a Jewish State”, <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-official-pa-will-never-recognize-israel-as-jewish-state-1.318613#commentsForm-318613>. Akses pada 12 Oktober 2010.

Howard Schneider. “Netanyahu Endorses Palestinian Independence”,
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/06/14/AR2009061400741.html>. Akses pada 24 Maret 2011.

-----”. “Starting Point for Mideast Talks Remains an Issue, Analysts Say”, <http://www.washingtonpost.com/wp->

[dyn/content/article/2009/09/23/AR2009092304352.html](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/23/AR2009092304352.html). Akses pada 28 Februari 2011.

Interview by Lally Weymouth. “Netanyahu’s Middle East Outlook”,
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/02/27/AR2009022702278.html>. Akses pada 21 Oktober 2010.

“Interview with PA President Mahmoud Abbas: ‘I Will Not Back Down’“,
<http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,676374,00.html>. Akses pada 16 Maret 2011.

Ira Chernus. “‘Palestinians’ without ‘Palestine’”,
http://www.fpif.org/articles/palestinians_without_palestine. Akses pada 10 Oktober 2010.

Isabel Kershner. “Netanyahu To Form New Israel Government”,
http://www.nytimes.com/2009/02/21/world/middleeast/21israel.html?_r=1&ref=benjamin_netanyahu. Akses pada 9 Oktober 2010.

“Israeli and Palestinian Talks to Resume”,
<http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/08/201082012452252467.html>.
Akses pada 4 Juni 2011.

“Israeli PM Faces Pressure Ahead of Major Policy Speech”,
<http://www.voanews.com/english/news/a-13-2009-06-12-voa29-68788307.html>.
Akses pada 8 Mei 2011.

JPost.com Staff. “Lieberman: PA Refused to Accept Freeze for 9 Months”,
<http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=189438>. Akses pada 13 Oktober 2010.

JPost.com Staff. “Talks to Continue If Settlement Building Remains Frozen”,
<http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?ID=188687&R=R1>. Akses pada 21 Maret 2011.

Josh Mitnick. "Netanyahu's Two State Solution: You Recognize Us, We'll Recognize You", <http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2009/0615/p06s16-wome.html>. Akses pada 16 Desember 2010.

Kenig Ofer. "Israel's New Government", <http://www.idi.org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/elections09/Pages/IsraelsNewGovernment.aspx>. Akses 13 Desember 2010.

"Key Principle of the Peace Process". http://www.aipac.org/Publications/AIPACAnalysesMemos/Key_Principles_of_the_Peace_Process.pdf. Akses pada 14 Maret.

Paul Reynolds. "Middle East Peace Talks: Where They Stand", <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11138790>. Akses pada 1 April 2011.

Mark Landler & Ethan Bronner. "In Curt Exchange, U.S. Faults Israel on Housing", <http://www.nytimes.com/2010/11/10/world/middleeast/10jerusalem.html>. Akses pada 31 Maret 2011.

Mark Tran. "Netanyahu calls for New Israeli elections". <http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/31/israelandthepalestinians1>. Akses pada 23 Oktober 2010.

Matthew Lee. "Mideast Peace Talks Hit Settlement Roadblock: Abbas Says Israel Must Choose", http://www.huffingtonpost.com/2010/09/25/mideast-peace-talks-hit-s_n_739286.html. Akses 31 Maret 2011.

Matt Beynon Rees, "Analysis: All Talk, No Two-State Solution", <http://www.globalpost.com/dispatch/israel-palestine/100708/two-state-solution-netanyahu-abbas>. Akses pada 16 Desember 2010.

Meredith Buel. "U.S. Launches Direct Mideast Peace Talks", <http://www.voanews.com/english/news/Israel-Palestinians-to-Resume-Peace-Talks-in-Washington-102055533.html>. Akses pada 8 Mei 2011.

Mossawa Center. "One Year for Israel's New Government and the Arab Minority in Israel",
<http://www.mossawacenter.org/files/files/File/Reports/2010/Netanyahu%20Final.pdf>.
Akses pada 11 Maret 2011.

M. Hamdan Basyar, "Ganjalan Perdamaian Palestina dan Israel",
<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/middle-east-affairs/329-ganjalan-perdamaian-palestina-dan-israel>. Akses pada 20 Oktober 2010.

Natasha Mozgovaya. "Netanyahu: No Peace Until Palestinians Accept Israel As Jewish State", <http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-no-peace-until-palestinians-accept-israel-as-jewish-state-1.7350>. Akses pada 28 Februari 2011.

"Israel Tawarkan Opsi Perdamaian Baru",
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/03/100319_netanyahu.shtml. Akses pada 8 Oktober 2010.

"Obama, Netanyahu Discuss U.S.-Israeli Disagreements",
http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/05/18/mideast.obama.netanyahu/index.html?eref=rss_topstories. Akses pada 2 Januari 2011.

"PM Netanyahu Addresses the Council on Foreign Relations",
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2010/PM_Netanyahu_address_Council_Foreign_Relations_8-Jul-2010.htm?DisplayMode=print.
Akses pada 2 Juni 2011.

"PM Netanyahu Addresses the Saban Forum",
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2009/PM_Netanyahu_addresses_Saban_Forum_15-Nov-2009. Akses pada 8 Agustus 2010.

"PM Benjamin Netanyahu: AIPAC Policy Conference 2009 May, 4 2009",
<http://www.aipac.org/Publications/SpeechesByPolicymakers/PMNetanyahuPC09.pdf>.
Akses pada 10 Januari 2011.

“PM Netanyahu welcomes beginning of proximity talks,”
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2010/PM_Netanyahu_beginning_proximity_talks_9-May-2010.htm. Akses pada 20 Maret 2011.

“PM Netanyahu’s Speech at the General Assembly of the Jewish Federations of North America in New Orleans”,
<http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/PMSpeaks/speechga081110.htm>. Akses pada 16 Februari 2011.

“PM Netanyahu’s Speech at the Opening of the Knesset Winter Session”,
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2010/PM_Netanyahu_Knesset_speech_11_Oct_2010.htm. Akses pada 1 Mei 2011.

“Prime Minister’s Foreign Policy Speech at the Begin-Sadat Center at Bar-Ilan University, June 14, 2009”, The Israel Project,
<http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=hsJPK0PIJpH&b=689705&ct=7128353>. Akses pada 16 Desember 2010.

Robert Berger. “Palestinians Seek UN Condemnation of Israeli Settlements”,
<http://www.voanews.com/english/news/middle-east/Palestinians-Seek-UN-Condemnation-of-Israeli-Settlements-112377034.html>. Akses pada 8 Mei 2011.

Roni Sofer. “Netanyahu Defends Speech to Party Hardliners”,
<http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3731827,00.html>. Akses pada 13 Oktober 2010.

“Statement by PM Netanyahu on the Cabinet Decision to Suspend New Construction in Judea and Samaria”,
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2009/Statement%20by%20PM_Netanyahu_suspend_new_construction_Judea_Samaria_25-Nov-2009. Akses pada 10 Oktober 2010.

The Associated Press. “Palestinian PM: Plan to Declare Statehood by 2011 Remains on Track”, <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-pm-plan-to-declare-statehood-by-2011-remains-on-track-1.331324>. Akses pada 26 April 2011.

“The Bibi Report”, <http://bibireport.blogspot.com/2010/09/mk-danny-danon-to-obama-respect-right.html>. Akses pada 21 Oktober 2010.

The Israel Project. “Timeline of Israel’s Peace Efforts during the Obama Administration”,
<http://www.theisraelproject.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=hsJPK0PIIpH&b=689705&ct=8416227>. Akses pada 20 Maret 2011.

“The Resumption of Direct Talks between Israel and The Palestinians”,
http://www.mfa.gov.il/MFA/History/Modern+History/Historic+Events/Special_update_Resumption_talks_Israel_Palestinians_2-Sep-2010.htm. Akses pada 18 Maret 2011.

“Timeline of Palestinian Israeli History and the Arab-Israeli Conflict”,
<http://www.mideastweb.org/timeline.htm>. akses pada 21 April 2011.

Tony Karon. “Palestinians Hold to Peace Talk Preconditions”,
<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2007604,00.html>. Akses pada 16 Maret 2011.

Tovah Lazaroff . “Netanyahu To Obama: Jerusalem Is Not A Settlement”,
<http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=194673>. Akses pada 31 Maret 2011.

Wikipedia. “Benjamin Netanyahu”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu. Akses pada 13 Oktober 2010.